

**PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ISLAM
(STUDI DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun oleh

Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi

NIM : 1906016124

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP UIN

Walisongo Semarang di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Shalahuddin Al Ayyubi

NIM : 1906016124

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pelembagaan Partai Politik Islam (Studi Di Dewan Pelembagaan
Partai Politik Islam Jawa Tengah)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 2023

Pembimbing



Dr. Rofiq, M. Si

SKRIPSI
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIKK ISLAM
(Studi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah)

Disusun Oleh

Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi

1906016124

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal 22 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Muhammad Mahsun, M.A

Penguji I

Muhammad Mahsun, M.A

Sekretaris

Dr. Rofiq, M. Si

Penguji II

M. Nuqlir Bariklana, M. Si

Pembimbing

Dr. Rofiq, M. Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pelebagaan Partai Politik Islam : Studi Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. sekian dan terima kasih.

Semarang, 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi

Nim : 1906016124

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelebagaan Partai Politik Islam : Studi Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di Fisip UIN Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hadratussyaikh Romo KH. Achmad Asrori Al Ishaqy R.A teristimewa kepada murabbi tercinta yang selalu ada di hati, selalu membimbing kami para muridnya dengan tulus, banyak ilmu dan wejangan berharga yang kami dapat selama belajar dari beliau, sehingga kami mampu membuka wawasan baru dalam mempelajari apapun termasuk menulis skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih tak cukup hanya dilafalkan namun akan tetap menjadi do'a kami sebagai bentuk keikhlasan hati.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M. Hum yang telah memberikan arahan serta nasehat yang sangat berharga sehingga penelitian tugas akhir saya menjadi lebih baik. Terimakasih atas fasilitas yang telah disediakan hingga dapat bermanfaat membantu mahasiswa-mahasiswanya selesai menyusun karya ilmiah.

3. Kepala jurusan Ilmu Politik FISIP Drs. Nur Syamsudin, M.Ag yang telah memberi bimbingan dan dukungan dalam membantu segalanya dalam akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris jurusan Ilmu Politik yang telah memfasilitasi segala sesuatu dalam bagian administrasi maupun akademik, serta membimbing dan memberi ilmu selama kuliah.
5. Dr. Rofid Mahfudz, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberi arahan dan nasehat senantiasa sabar dan tulus, selalu meluangkan waktunya, terimakasih atas kesabaran dan dedikasinya selama membimbing serta memberi motivasi sehingga dapat menyelesaikan karya penulisan ini
6. The One and Only, Ibunda penulis. Ibu Siti Maghfiroh atas segala dukungan motivasi, moral, material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis sampai dengan titik ini dengan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Adik penulis, Zulfa Rahma Nabila yang saat ini sedang mengenyam Pendidikan di MAN KENDAL dan tinggal di Ma'hadnya. Semoga dapat menuntut ilmu dengan baik dan lancer serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan harapan.
8. Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Syamsurie, M. Ngainirrichadl, Farid Masduqi, Afif, Laeli Rudsiana, serta Jajaran pengurus DPW PPP Jawa Tengah yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.
9. Rekan-rekan dekat penulis di jurusan, fakultas, se-universitas maupun di luar universitas yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis.
10. Seluruh bagian dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN WALISONGO Semarang yang telah menerima dan memberi segala sesuatunya dalam menempuh Pendidikan, serta membantu dalam hal apapun secara langsung maupun tidak langsung

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan segala syukur dipanjatkan pada Allah SWT Tuhan semesta alam dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta kekuasaanya Saya persembahkan sebuah karya ini untuk Ibu Siti Maghfiroh yang telah berjuang keras untuk membiayai anaknya kuliah dan tidak pernah berhenti dalam memanjatkan doa-doa yang terbaik untuk anaknya.

Selanjutnya, kepada sosok pengajar sekaligus guru spiritual saya, yaitu KH. Achmad Asrori Al-Ishaqy yang telah memberikan banyak ilmu serta tuntunan bekal dalam dunia ini sebelum kami merindukannya selamanya, semoga kami diakui selalu sebagai muridmu wahai guru.

Untuk dosen pembimbing Bapak Rofiq Mahfudz yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan serta motivasi agar bisa menjadi seorang akademisi hebat seperti beliau.

Terakhir, untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Poitik, UIN Walisongo Semarang yang sudah menjadi tempat bagi saya untuk belajar dan bekal untuk menjadi pegangan kesuksesan saya dimasa depan.

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.”

-HR. Muslim No. 2699

“Berkembang dan mengamalkan ilmu dengan intelektualitas, rasionalitas, dan spiritualitas”

-M. Shalahuddin Al Ayyubi

ABSTRAK

Pelebagaan partai politik memberi pengaruh besar terhadap kemenangan suatu partai politik. Saat pelebagaan suatu partai kurang baik maka akan memberi pengaruh terhadap perolehan suaranya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu dari partai politik tua di Indonesia, yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian di Indonesia, tetapi perolehan suaranya selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu baik di pusat maupun di provinsi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Selama pemilu di Jawa Tengah dari pemilu 1977 sampai pemilu 2019 DPW PPP Jawa Tengah mendapatkan suara yang terus berkurang. Sedangkan partai ini sudah sepuluh kali ikut serta dalam pemilu di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelebagaan partai politik DPW PPP Jawa Tengah dalam menghadapi pemilu dan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota DPW PPP Jawa Tengah sudah menggambarkan tingkat pelebagaan partai politik yang tinggi atau rendah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelebagaan DPW PPP Jawa Tengah. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Bertolak dari kerangka teoritik pelebagaan partai politik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berfokus pada empat derajat pelebagaan. Hasil penelitian memperlihatkan derajat kesisteman (*systemness*) dalam proses pelebagaan di tubuh PPP Jawa Tengah masih belum dapat dikatakan ideal. Faktor-faktor seperti penggunaan aturan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam konstitusi partai belum mampu diterjemahkan PPP Jawa Tengah dalam manajemen keorganisasian. Di level derajat identitas nilai (*value infusion*), PPP Jawa Tengah konsisten mengusung nilai yang menjadi landasan partai. Namun, secara praktis beberapa narasi yang diusung partai tidak terlalu mendatangkan insentif secara elektoral. Di level *decisional autonomy*, kondisi PPP Jawa Tengah yang hanya mengandalkan sumber pembiayaan partai dari sumber internal, kendati kondisi ini memberikan keleluasaan dan derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan, namun keterbatasan kemampuan keuangan berdampak pada efektifitas jalannya organisasi. Di level *value infusion*, narasi dan isu yang dibawa partai menjadikan mereka dekat dengan segmen pemilih dari kelompok minoritas, baik dari kelompok keagamaan maupun etnis. Di level keempat (*reification*), diferensiasi identitas yang dibawa partai nampak belum membumi di tengah publik Jawa Tengah.

Kata Kunci: Pelebagaan partai, Partai politik islam, PPP, Derajat Pelebagaan.

ABSTRACT

The institutionalization of political parties has a major influence on the victory of a political party. When the institutionalization of a party is not good, it will have an influence on its vote acquisition. The United Development Party (PPP) is one of the old political parties in Indonesia, which has had a long history in the history of parties in Indonesia, but its vote acquisition has always decreased from time to time both at the center and in the provinces, especially in Central Java Province. During the elections in Central Java, from the 1977 election to the 2019 elections, the Central Java DPW PPP received fewer and fewer votes. Meanwhile, this party has participated in elections in Central Java ten times. The purpose of this study was to identify the institutionalization of the Central Java DPW PPP political party in the face of elections and to find out the pattern of recruitment of prospective members of the Central Java DPW PPP which has described a high or low level of institutionalization of political parties.

This study aims to analyze the institutionalization process of the Central Java DPW PPP. This study was designed using qualitative methods. Starting from the theoretical framework of political party institutionalization, this research produces several findings that focus on four degrees of institutionalization. The results of the study show that the degree of systemness in the process of institutionalization within PPP Central Java cannot be said to be ideal. Factors such as the use of rules, procedures and mechanisms that were agreed upon and stipulated in the party constitution have not been able to be translated by the Central Java PPP in organizational management. At the level of degree of value identity (value infusion), PPP Central Java consistently carries the values that form the basis of the party. However, practically speaking, some of the narratives carried by the party do not really generate electoral incentives. At the level of decisional autonomy, the condition of the PPP in Central Java which only relies on party financing sources from internal sources, although this condition provides flexibility and a degree of autonomy for a party in making decisions, limited financial capacity has an impact on the effectiveness of the organization's operations. At the value infusion level, the narratives and issues brought by the parties make them close to the minority voter segment, both from religious and ethnic groups. At the fourth level (reification), identity differentiation brought by the party seems to have not yet grounded in Central Java's public.

Keywords: Party institutionalization, Islamic political parties, PPP, Degree of Institutionalization.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Pelembagaan Partai Politik Islam	13
2. Politik Elektoral	20
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
2. Sumber dan Jenis Data.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II.....	30
POLITICAL PARTY, SYSTEMNESS, VALUE INFUSUION, DECISIONAL AUTONOMY, REIFICATION	30

A.	Partai Politik	30
B.	Pelebagaan Partai Politik.....	32
1.	Derajat Kesisteman (<i>Systemnes</i>).....	33
2.	Identitas Nilai.....	33
3.	Derajat Otonomi	34
4.	Pengetahun Publik/Reifikasi.....	35
BAB III		36
LANDSCAPE DAN DINAMIKA POLITIK PPP JAWA TENGAH		36
A.	Founding Partai Persatuan Pembangunan.....	36
1.	Partai Persatuan Pembangun.....	38
2.	Aklamasi Muktamar	40
3.	Platform Partai Persatuan Pembangunan	42
5.	Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan.....	44
6.	Tujuan PPP	45
B.	DPW PPP Jawa Tengah.....	46
1.	Perjalanan DPW PPP Jawa Tengah.....	46
2.	Dinamika elektoral PPP di Jawa Tengah.....	54
BAB IV		60
DIMENSI INTERNAL SYSTEMNESS DAN VALUE INFUSION.....		60
A.	Derajat Kesisteman.....	61
1.	Pelaksanaan AD/ART.....	61
2.	Penentu Keputusan dalam Partai	77
B.	Derajat Identitas Nilai.....	79
1.	Hubungan PPP dengan kelompok populis tertentu.....	80
2.	Pengaruh Klientesme Dalam Organisasi	82
3.	Proses Rekrutmen Politik.....	83
4.	Pertanggungjawaban Kinerja PPP ke Publik	86

BAB V	87
DIMENSI EKSTERNAL DESICIONAL OTONOMI DAN REIFICATION	87
A. Derajat Otonomi	88
1. PPP dalam Bersikap Terhadap Pemerintah Daerah	88
2. Hubungan PPP dalam Politik dengan Partai Lain.....	90
3. Koalisi yang di Bangun.....	91
4. Keuangan DPW PPP Jawa Tengah.....	65
5. Pengaruh luar dalam pengambilan keputusan PPP	92
B. Derajat Pengetahuan Publik.....	92
1. Partisipasi Politik DPW PPP Jawa Tengah dalam dinamika Politik Elektoral...	93
2. Partisipasi Partai terhadap masyarakat terkait strategi komunikasi politik.....	95
BAB VI	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran dan Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dimensi pelembagaan partai politik versi Randall dan svasand.....	44
Tabel 3.1 Para Deklarator Partai Persatuan Pembangunan.....	51
Tabel 3.2 Filosofi Logo PPP.....	54
Tabel 3.4 Susunan Pengurus DPW PPP Jawa Tengah.....	62
Table 3.5 Perolehan Suara PPP Pemilihan Umum 2019.....	67
Tabel 3.6 Suara Keseluruhan Partai Politik Pemilu 2019.....	70
Tabel 4.1 Badan Otonom PPP Jawa Tengah.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Partai Persatuan Pembangunan.....	53
Gambar 4.1 RAPIMWIL DPW PPP Jawa Tengah.....	82
Gambar 4.2 Musyawarah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah.....	99
Gambar 5.1 DPW PPP Jawa Tengah Bersama Generasi Muda.....	127
Gambar 5.2 DPW PPP Jawa Tengah Bersama Para Ulama.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik dipandang sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Indonesia adalah salah satu negara yang juga menerapkan sistem politik demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, sehingga partai politik adalah institusi yang di anggap penting dan *sine qua non* dalam mengimplentasikan prinsip kedaulatan rakyat, negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat (Mahfud, 1993).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Indonesia saat ini, partai politik dikatakan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan partai politik dikatakan sebagai salah satu indikator berjalannya sistem politik yang menaungi keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai dengan pelembagaan partai tersebut. Hal ini tidak lepas dari beberapa fungsi yang dijalankan partai politik sebagai representasi rakyat dalam proses politik (pembuatan kebijakan negara) (Mahfud, 1993).

Pelembagaan partai politik menurut Huntington (1983) adalah proses pematangan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung.

Menurut analisis Samuel Huntington yang melihat bagaimana proses pelembagaan partai politik di Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika dan Asia menyatakan bahwa pelembagaan partai politik merupakan hasil atas persaingan dan perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi (Huntington, 1983).

Persaingan dan perluasan partisipasi dalam proses demokrasi tersebut, dapat dipahami bahwa makna pelembagaan menurut Huntington berakar dan bermuara pada upaya menemukan nilai baku dan stabil. Nilai baku dan stabil berarti nilai yang bersifat tetap, diakui dan diterima masyarakat sebagai patokan berbuat dan bertindak serta menjadi identitas berhubungan dengan komunitas masyarakat lainnya. Bentuk persaingan dan perluasan partisipasi di dalam proses demokrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Huntington tersebut dalam kondisi masyarakat yang beragam menuntut partai politik mampu mengakomodasi banyak kepentingan agar tetap dapat eksis dan bersaing secara elektoral. Dan organisasi sayap partai politik merupakan salah satu pilar penting dari wujud sifat yang akomodatif tersebut (Huntington, 1983).

PPP merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam di Indonesia dengan ceruk pasar suara yang seharusnya berlimpah. Menurut Isdiyanto Isman (dalam Masruhan, 2021) Dari sisi kuantitas, muslim merupakan populasi terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil perolehan suara di setiap pemilu. Situasi inilah yang perlu dicarikan penyebab dan solusi, mengapa partai hasil fusi partai politik Islam ini tidak mendapat benefit politik melalui gelaran pemilu khususnya di era reformasi ini. Sejarah beridrianya PPP yang disokong oleh hampir semua unsur Islam di Indonsia yang tergabung yakni Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Islamiyah (Parti) dan Partai Parmusi sejatinya menjadi modal penting untuk menampilkan partai Islam yang berwajah Indonesia (Masruhan, 2021).

Studi ini mengkaji tentang pelembagaan DPW Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah pada tahun 2019-2024. Menurut Masruhan (2021) Sejak era reformasi, PPP banyak mengalami berbagai tekanan, baik tekanan dari internal maupun eksternal. Namun yang berakibat cukup fatal dan berimbas kepada perolehan dan dukungan adalah tekanan yang bersifat internal. Konflik internal yang berkepanjangan akibat perebutan kekuasaan merupakan salah satu faktor yang menjadikan suara dan dukungan PPP terus merosot. Namun disaat setelah perpecahan ditubuh PPP dapat teratasi dan PPP resmi hanya satu gerbang, tidak ada dua kubu yang bersebrangan lagi, justru PPP diterpa musibah Kembali oleh

tokoh elitnya dalam tindak pidana korupsi. Yang lebih fatalnya kasus tersebut terjadi menjelang pemilu, sehingga menjadikan partai PPP semakin terpuruk dari segi kelembagaan dan citra masyarakat (Masruhan, 2021).

Permasalahan pusat yang mempengaruhi DPW Jawa Tengah dalam keberlangsungan DPW PPP Jawa Tengah kedepan adalah pemilihan Ketua DPW PPP Jawa Tengah yang terimbasakan faksionalisme antara Romahurmuziy dengan Djan Faridz yang melibatkan sentral KH. Maimoen. Rapat Besar Pengurus diadakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam ruangan rapat terbagi menjadi dua kubu yang mendukung Djan Faridz atau Gus Romy. Putra-putra Kiai Maimoen berada di sisi Djan Faridz, tetapi Kiai Maimoen memiliki pandangan yang berbeda. Ia mempercayakan pilihannya kepada Gus Aang, putra Kiai Thoyfoer. Gus Aang duduk di tengah-tengah antara dua kubu, menunjukkan ketidaknyamanan. Gus Aang membawa pesan dari Kiai Maimoen dan akhirnya menyatakan dukungannya pada Gus Romy. Hal ini mengindikasikan dukungan Kiai Maimoen pada Gus Romy. Beberapa pengurus wilayah sudah menduga bahwa Kiai Maimoen sejak awal berada di pihak Gus Romy. PPP dari kubu Gus Romy akhirnya secara resmi disahkan oleh Kementerian Agama. Beberapa putra Kiai Maimoen bergabung dengan kubu Gus Romy, sementara satu orang tetap di kubu Djan Faridz. Gus Yasin mendukung Gus Romy, sementara Gus Wafi tetap setia pada Djan Faridz. Gus Wafi menjadi Ketua DPW PPP Jawa Tengah dari pihak Djan Faridz yang melawan Masruhan Samsurie, Ketua DPW PPP Jawa Tengah dari pihak Gus Romy.

Pasca ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tetapi ada beberapa fakta sekaligus kejutan yang terjadi dalam Pemilu serentak 2019 di Jawa Tengah menurut surat kabar yang beredar. Ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK disinyalir hal tersebut mempengaruhi turunnya perolehan suara PPP ditingkat nasional. Salah satunya adalah berdasarkan Pengumuman Nomor : 290/PL.01.7- Pu/3322/KPU.Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 Tingkat Jawa Tengah, terlihat perolehan dengan penurunan suara tetapi di dukung penaikan satu kursi dengan pelebaran dapil di Jawa Tengah.

Pemilihan Umum di era Reformasi dimulai tahun 1999, dengan sistem atau aturan pemilu yang dibuat menerapkan sistem multi partai. Para pengamat politik menilai pemilu 1999 kembali pada pemilu 1955 karena peserta pemilu diikuti dari berbagai partai politik. Dari tahun 1999 tersebut PPP di Jawa Tengah memulai penurunan perolehan suara, meski pada pemilu tahun 2019 PPP Jawa Tengah mendapatkan 1 kursi lebih banyak dari tahun 2014 hal tersebut tidak dengan perolehan suaranya yang menurun, perolehan tambahan kursi tersebut dikarenakan pelebaran dapil. Pemilu pertama kali pasca-reformasi PPP Jawa Tengah mendapatkan 10 kursi dengan posisi nomor 4 dibawah PDIP, Golkar, dan PKB. Selanjutnya pada pemilu 2004, PPP tetap konsisten mendapatkan 10 kursi dengan suara 1,59jt (9,06%) suara sah nasional dengan total 15,87 juta suara sah nasional. Pada pemilu tahun 2009 PPP mengalami banyak penurunan suara dengan memperoleh 8 kursi, kemudian pemilu tahun 2014 masih konsisten dengan kursi dan suaranya yaitu 8 kursi di parlemen, kemudian pada pemilu tahun 2019 kembali mengalami penurunan suara akan tetapi dengan pelebaran dapil PPP Jawa Tengah mendapatkan penambahan kursi menjadi 9 anggotanya dengan suara 1,44jt dengan posisi nomor 6 dari total suara sah nasional 27,89jt (www.jateng.kpu.go.id).

Sebagai pelembagaan penguatan dan dibawah kepemimpinan ketua umum yang baru di era pelantikan Suharso Monoarfa maka mesin partai tentu akan berbeda, dukungan dari seluruh kader dan badan otonom (banom) di DPW PPP Jawa Tengah tentu akan berpengaruh, kembali mendekati dengan tokoh ulama yang dulu sering dilakukan oleh KH Ahmad Thoifur yang sekarang semakin memudar dan jarang dilihat oleh masyarakat di Jawa Tengah, kemudian bersama-sama dengan santri yang merupakan bakal pendukung penerus generasi PPP, dapat dilihat PPP sekarang dengan kekuatan dari santri yang menduduki jabatan sebagai kader PPP terkhusus santri Mbah Moen Sarang Rembang dan para putra beliau (Masruhan, 2021).

Fokus kajian pelembagaan partai politik ini menggunakan teori Vicky Randall dan Lars Svasand, partai politik dianggap terlembaga apabila didalamnya terdapat empat derajat pelembagaan seperti Derajat Kesisteman, Derajat Identitas Nilai, Derajat Otonomi Keputusan dan Derajat Pengetahuan Publik. Berdasarkan teori yang digunakan, maka hasil penelitian ini antara lain membuktikan

bahwasannya partai dapat dikatakan telah terlembaga atau belum terlembaga berdasarkan empat derajat konsep teori pelebagaan parpol menurut Vicky Randall dan Lars Svasand. Sehingga dapat dibuktikan langsung dengan hasil penemuan penelitian dimana pelebagaan partai memiliki sisi kekurangannya atau kebermanfaatan partai politik Islam tersebut dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di Jawa Tengah.

Kajian ini penting untuk dilakukan dengan dua argumentasi, secara teoritis studi ini menimbang diskursus tentang dinamika pelebagaan partai politik islam di Indonesia. Sedangkan, secara praktis studi ini bisa menjadi referensi bagi pimpinan partai untuk melihat sejauh mana mengkonsolidasikan internal partai. Perpesktif pelebagaan partai perlu dikaji kembali dalam pandangan politik, apakah faktor melemahnya pelebagaan partai politik secara khusus, dan sistem kepartaian secara umum, dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya survalitas partai politik. Oleh karena itu, melalui pengkajian pada partai politik islam ini, penulis ingin melihat dinamika dalam pelebagaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana dimensi internal Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah dalam aspek kesisteman dan identitas nilai?
2. Bagaimana dimensi eksternal Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah dari sisi Otonomi dan reifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Dimensi Inernal pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah dalam aspek kesisteman dan identitas nilai.
2. Mengetahui Dimensi Eksternal pelebagaan PPP Jawa Tengah dalam aspek otonomi dan reifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan khasanah baru keilmuan dan mengembangkan wawasan serta dapat mengenalkan teori pelebagaan partai politik serta memberikan gambaran penerapannya dalam pelebagaan khususnya Partai Politik Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna menjadi bahan referensi untuk melatih maasiswa sebagai rujukan dalam menganalisis teori-teori mengenai pelebagaan Partai Politik Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang pelebagaan partai politik di Indonesia sudah banyak dilakukan dalam penelitian lain. Berdasarkan pada pembacaan literatur yang ada, setidaknya studi-studi itu dapat dikelompokkan menjadi dua tema kajian, yaitu pelebagaan partai politik islam dan politik elektoral. Peneliti mencoba melihat pola serangkaian penelitian terdahulu dan melakukan analisis untuk kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Berikut adalah kajian pustaka dari penelitian ini :

1. Pelebagaan Partai Politik Islam

Kajian berkaitan dengan pelebagaan partai politik islam ini bersumber dari beberapa penelitian yang memiliki persamaan topik, para peneliti yang bercondong pada peembahasan sistem didalam tubuh partai politik islam. Seperti yang dilakukan oleh Agung (2021) dengan hasil kajiannya instutionalisasi yang mempunyai pengaruh sebagai partai islam fundamental dengan partai islam gabungan dari fusi partai islam dalam pendekatannya masing-masing sebagai pelebagaan partai. Kemudian kajian Azizah (2014) dengan hasil kajiannya yang menjelaskan secara spesifik implementasi Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan seberapa jauh dalam partai dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kajian berkaitan dengan pelebagaan partai politik islam juga dilakukan oleh Dinda (2015) yang menjelaskan bagaimana pengaruh adanya faksi-faksi didalam tubuh DPW PPP Jatim antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz. Selain itu Charlyna (2017) melakukan penelitian berkaitan dengan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang

berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (*dogmatic legal research*), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Kajian serupa juga dilakukan oleh Alfian (2012) yang mengkaji tentang pelebagaan partai politik islam berfokus pada pengelolaan konflik yang ada didalam tubuh internal partai politik dimana pengurus DPW PPP Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan untuk membeukan kepengurusan partai di kabupaten Bangkalan yang dianggap tidak berfungsi dengan maksimal dalam pelebagaannya maupun sampai dengan politik elektoral.

Kajian yang pertama ditulis oleh Agung (2021) dengan judul Institutionalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan di Kota Palembang yang diterbitkan oleh Ampera: Jurnal Politik dan Peradaban Islam. Dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan mengenai instutionalisasi partai politik islam menunjukkan bagaimana Pelebagaan Partai Politik Islam dalam proses pelebagaan berbagai aspek, partai politik Islam dapat dikatakan sudah atau belum terlembaga dilihat dari sebagai berikut. Pertama, derajat kesisteman (*systemness*). Kedua, derajat identitas nilai (*value infusion*). Ketiga, derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*). Hal ini pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan pemerintah maupun dengan sumber dana dari pemerintah, kader ataupun pengusaha dan sumber dukungan massa pemilih (*organisasi masyarakat*) diatur dalam AD/ART. Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa hampir memiliki kesamaan dimana setiap keputusan yang diambil melalui hasil musyawarah majelis partai, dalam hal dana partai mendapatkan dana dari iuran kader, iuran anggota legislatif dan dana anggaran Partai Politik dari Pemerintah diperoleh berdasarkan jumlah suara dan kursi didapatkan dari instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (*Bakesbangpol*).

Penulis memberikan penjelasan pelebagaan partai melakukan penataan internal organisasi untuk mencapai tujuan, partai mempunyai tiga indikator untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, yaitu penerapan demokrasi internal partai, sistem dan kaderisasi partai, serta *kohesivitas* (keutuhan) partai, partai dalam pelaksanaan menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada. Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan. Oleh karenanya, Partai sendiri lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh kader maupun pengurus daerah, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi (dalam hal ini Pengurus Tingkat Provinsi dan Pengurus Nasional).

Kajian kedua ditulis oleh Azizah (2014) dengan judul *Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai Rumah Aspirasi Masyarakat*. Penelitian ini bermaksud mengkesplorasikan tentang fungsi penyalur tentang fungsi penyalur aspirasi dan peran komunikasi partai politik. Penulis menjelaskan bahwa salah satu fungsi partai sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat C UU NO. 2 Th 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai sarana penyerap, perhimpunan dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa partai politik merupakan aktor dominan dalam proses pengambilan kebijakan negara atau pemerintah.

Mengaktualisasikan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat tersebut, dalam hal ini peneliti hanya mengambil beberapa bentuk program kerja sebagai sarana penjangkaran dan penyalur aspirasi. Peningkatan peran serta partisipasi partai baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan daya tawar partai melalui peran nyata organisasi di tengah-tengah masyarakat. Peningkatan jalinan komunikasi dan kordinasi dengan instansi pemerintah/Lembaga-lembaga lain seperti; organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), pondok pesantren dan muspida yang

memiliki keterkaitan dengan program dan kebijakan organisasi yang ada dalam partai.

Aktualisasi fungsi komunikasi politik partai sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat sebagai tugas yang diemban, pola komunikasi politik dalam partai mengelolanya menggunakan tiga pola komunikasi politik, yaitu Top Down Model, Bottom Up Model dan pola Konvergensi (*combination model*). Lebih jelasnya diuraikan sebagai, Pola Top Down, pola komunikasi politik ini digunakan oleh partai dengan langsung mengambil policy tanpa harus dikonfirmasi kepada konstituen terlebih dahulu. Artinya partai melalui rapat harian pengurus melakukan Tindakan langsung terkait dengan sebuah policy. Atau bisa dikenal dengan istilah kebijakan/policy dari atas kebawah. Beberapa kebijakan yang diambil langsung oleh pengurus partai tingkat provinsi adalah terkait dengan penentuan sistem dan manajemen partai, termasuk juga dengan hal penataan penyaluran fungsi aspirasi masyarakat. Kemudian, Pola Bottom Up, seperti pada umumnya sebuah partai, Dewan Wilayah Pimpinan PPP Jatim menjaring aspirasi masyarakat langsung dari bawah. Dulu istilah ini dikenal dengan “jarring asmara” (jarring aspirasi masyarakat). Pola ini digunakan untuk menentukan policy partai yang sifatnya signifikan. Seperti dalam penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota.

Pola Konvergensi, Pola ini merupakan campuran antara top down dengan bottom up, dimana dengan pola ini pengurus tingkat provinsi partai menyerap aspirasi masyarakat dan konstituen. Partai kemudian menindak lanjuti dengan rapat harian terbatas.

Kajian ketiga ditulis oleh Dinda (2015) dengan judul *Masa Depan Partai Politik Islam (Studi Tentang Konflik Elit PPP Dalam Perspektif Pengurus DPW PPP Jawa Timur)* Penelitian terkait menjelaskan peta politik Peta politik yang ada di DPW Jawa Timur terdiri dari faksi-faksi yang ada di dalamnya, model konflik yang terjadi dan dialektika antar faksi. Pertama, faksi yang dimaksud adalah Musyaffa Noer yang merupakan representasi kubu Romahurmuziy dan Masykur Hasyim serta Mujahid Anshori yang merepresentasikan kubu Djan Faridz. Kedua, konflik elit di DPP PPP yang terjadi saat dimulai pada Pilpres 2014 lalu yang menunjukkan rivalitas politik antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy dimana

akhirnya konflik tersebut juga sampai pada PPP level Jawa Timur. Struktur kepengurusan di DPW PPP Jawa Timur didominasi oleh kubu Romahurmuziy dalam hal ini yakni kepengurusan Musyaffa Noer. Kubu Djan Faridz yang diwakili oleh kepengurusan Masykur Hasyim memang tidak memiliki akses di DPW namun tidak menjadi masalah baginya yang terpenting adalah konsolidasi hingga ke cabang.

Kemudian peneliti menjelaskan terkait masa depan PPP pasca konflik elit yang terjadi ini menurut Musyaffa' Noer tidak mempengaruhi eksistensi partainya, karena masyarakat sudah paham jika konflik yang ada sebenarnya hanya di level atas, dan di level DPW Jawa Timur sendiri semuanya cenderung berjalan lancar, namun tetap saja PPP butuh inovasi yang lebih kekinian sehingga konstituen tidak jenuh dengan konflik yang ada. Menurut Mujahid Anshori konflik elit di PPP berkaitan dengan pelembagaan partai politik. Oleh karenanya PPP harus bisa merespon isu-isu di masyarakat serta mampu menerjemahkannya dalam program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan mengelola konflik secara baik maka masa depan PPP tidak akan terganggu.

Kajian keempat ditulis oleh Charlyna (2017) yang berjudul *Eksistensi Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (Studi Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014)*. Dalam studi ini memuat salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (dogmatic legal research), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan sengketa internal partai sebagaimana ditentukan secara jelas dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berisikan: a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; c) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; d) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; e) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara prosedural apabila terdapat perselisihan internal dalam partai politik, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan secara eksternal. Susunan atau keanggotaan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Terkait pembentukan Mahkamah Partai Politik itu sendiri tidak ada disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga diharapkan pembentukan Mahkamah Partai Politik menjunjung tinggi netralitas dalam penyelesaian sengketa internal yang terjadi. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.

Kajian kelima ditulis oleh Alfian (2012) dengan judul *Strategi Pengelolaan Konflik Internal Partai Politik (Studi Terhadap Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan)*. Penelitian ini menjelaskan terkait Konflik dalam tubuh partai politik yang menjadi fenomena unik di era reformasi ini. Umumnya, partai gagal melakukan konsensus untuk

menyelesaikan konflik. Akibatnya interaksi dalam kepentingan politik kerap menggunakan metode konflik. Konflik elite partai ini menjadi bukti tidak adanya konsensus bersama para elite partai. Salah satu konflik yang terjadi dalam internal partai politik adalah konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Timur. Dimana Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan untuk membekukan kepengurusan partai di Kabupaten Bangkalan yang dianggap tidak berfungsi dengan maksimal dalam pemilu tahun 2009. Bahkan ada indikasi adanya perlawanan dari pengurus DPD Kabupaten Bangkalan dalam kemenangan pemilu tahun 2009, sehingga Dewan Perwakilan Wilayah memutuskan untuk membekukan kepengurusannya. Disisi lain, unjuk rasa ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memprotes pembekuan Dewan Pimpinan Daerah PPP Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berakhir ricuh. Massa saling dorong dan baku pukul dengan petugas keamanan. Aksi saling dorong dan saling pukul antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan ketika massa memaksa masuk ke Kantor DPW PPP Jatim. Petugas menghalangi demonstran karena khawatir mereka akan bertindak anarkisme. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik oleh Dahrendorf, yang menyatakan bahwa kebanyakan konflik yang melibatkan massa tidak terlepas dari salah satu faktor kebijakan yang dianggap diskriminasi dan menjadi motivator untuk melakukan konflik, baik itu secara langsung ataupun sebaliknya. Hal ini telah dijelaskan oleh Dahrendorf yang telah menjelaskan tentang kondisi-kondisi dimana kepentingan laten itu menjadi manifest dan kelompok semu dapat diubah menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang bersifat konflik. Kondisi-kondisi ini diklasifikasikan sebagai, kondisi teknis, politik, dan sosial. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap objek peneliti, dari pelaksanaannya peneliti berhasil mengumpulkan data serta informasi yang akurat dari informan, sedangkan perspektif yang digunakan adalah bahwa data yang dikumpulkan di upayakan untuk di deskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan subjek penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya konflik internal bermula dari pengajuan calon untuk maju pada pemilihan ketua PPP yang menjadi asal muasal PPP Jatim membekukan sehingga menjalar ke cabang-cabang yang tidak memilih I.r Farid Al Fauzi. Akhirnya I.r Farid Al Fauzi selaku ketua terpilih melakukan atau memutuskan pembelaan PDC PPP secara merata yang tidak memilih I.r Farid Al Fauzi pada proses pemilihan PPP Jatim 2006-2012. DPC PPP Bangkalan yang tidak sepakat dengan pembekuan tersebut akhirnya melakukan gerakan penolakan terhadap keputusan tersebut didukung 39 cabang yang akan dibekukan oleh ketua terpilih.

Sedangkan faktor-faktor yang memicu konflik internal PPP Bangkalan adalah. *Pertama*, Perbedaan kepentingan pengurus partai, *Kedua*, Pembekuan secara merata yang melibatkan DPC PPP Bangkalan, *Ketiga*, Kebijakan pemilihan pimpinan wilayah tidak memakai ADRT partai, *Keempat*, Konflik internal parpol selain dari dukungan terhadap calon DPC atau DPW. Strategi yang digunakan DPC PPP dalam pengelolaan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan adalah dengan mengadakan pertemuan dari kedua belah pihak untuk mengantisipasi terhadap konflik internal PPP dengan mematuhi asas kebersamaan dan menjalankan persepsi yang berakhlakul karimah. Selain itu juga diperlukan penataan ulang dari tingkat kepengurusan dewan pimpinan cabang sampai ketinggian ranting untuk tetap konsisten atau istiqomah melalui sosialisasi dan koordinasi agar tidak terjadi kesenjangan dalam menjalankan roda partai politik. Selain itu, dengan memaksimalkan konsolidasi, penerapan program partai sesuai dengan AD/ART, penerapan open manajemen melaporkan yang akuntabel mempertajam loby personal, semua itu akan maksimal jika pimpinan partai memiliki dasar leadership yang matang dalam menjalankan visi dan misi partai. Dengan demikian digelarlah forum tabayyun (klarifikasi) oleh pimpinan pusat antara DPC PPP Bangkalan selaku yang dibekukan dan DPW PPP Jatim selaku pihak yang membekukan.

2. Politik Elektoral

Kajian tentang Politik Elektoral ini bersumber dari beberapa penelitian yang memiliki persamaan topik. Seperti yang telah dilakukan oleh (Advi, 2020; Ayuza, 2022; Fransiska, 2022; Salmi, 2022; Santo, 2021) Kajian yang dilakukan oleh Advi

(2022), tentang analisis penurunan suara partai golkar pada pemilu legislatif di kabupaten tanah datar tahun 2019. Penulis menjelaskan penyebab penurunan suara partai Golkar sesuai dengan hasil penelitian peneliti terjadi karena adanya perpecahan di internal partai Golkar. Kemudian pada penelitian yang serupa oleh Dewi (2022) tentang penurunan suara partai politik. Penulis mengungkapkan bahwa turunnya suara Partai Hanura dikarenakan oleh rekrutmen caleg yang baru di dunia politik dan tidak dikenal masyarakat serta apa adanya. Kemudian penelitian dari Fransiska (2022) tentang Eksistensi partai islam, penulis menjelaskan penerimaan masyarakat terhadap partai politik Islam dikarenakan asas partai tidak mempengaruhi perilaku pemilih dan isu identitas agama tidak mempengaruhi perilaku pemilih. Kemudian kajian Salmi (2022) tentang dinamika partisipasi pemilih, penulis menunjukkan bahwa KPU Kota Makassar telah mengatasi partisipasi pemilih yang flukatif. Selanjutnya, kajian penelitian oleh Santo (2021) tentang *Komunitas Masyarakat Dan Politik : Peran Dan Pengaruh Komunitas Masyarakat Dalam Pilkada Di Kota Makassar Tahun 2021*. Penelitian ini berfokus pada segmen komunitas yang bukan dibentuk oleh aktor politik maupun partai politik melainkan komunitas yang bersifat bebas dari ikatan dan sudah ada jauh sebelum pelaksanaan pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tautan politik antara komunitas dan pasangan kandidat Danny-Fatma dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar.

Kajian pertama ditulis oleh Advi (2020) yang berjudul ”*Analisis Penurunan Suara Partai Golkar pada pemilu legislative di kabupaten Tanah Datar Tahun 2019*”. Penelitian ini ini menemukan bahwa pada penyesuaian diri-kekakuan: Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar merupakan partai lama dengan usia partai yang cukup lama sehingga terjadinya kekakuan di tubuh partai dalam menanggapi situasi pemilu serentak tahun 2019, partai Golkar secara keseluruhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan apalagi dalam pelaksanaan pemilu berturut-turut namun tidak mampu merubah pandangan masyarakat untuk mempertahankan kemenangan terhadap pemilu 2019, selanjutnya, mengenai perpecahan dan kesatuan, penyebab penurunan suara partai Golkar sesuai dengan hasil penelitian peneliti terjadi karena adanya perpecahan di internal partai Golkar terbukti dengan keluarnya kader berpengaruh dari Golkar dan berpindah pada partai lain, kurang

solidnya sesama kader, tidak seperti dulu lagi ketika masa-masa jaya, ada konflik pribadi/internal sesama kader yang mengakibatkan lemahnya partai dan dilihat oleh masyarakat kemudian berefek pada pemilihan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Adanya penurunan suara partai ini sejatinya tidak terlepas dari pilihan masyarakat yang memilih dan budaya politik masyarakat di Kabupaten Tanah Datar yang cukup dinamis sesuai kondisi pemilu saat itu. Temuan baru peneliti bahwa penurunan suara partai terjadi karena mendapat efek dari calon/kandidat presiden kala itu yang mempengaruhi suara partai Golkar.

Kajian kedua ditulis oleh Ayuza (2022) yang berjudul “*Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dalam Perspektif Pelembagaan Partai Politik*”. Peneliti mengkaji terkait pelembagaan partai berdasarkan teori Matthias Basedau dan Alexander Stroh yang membagi pelembagaan partai atas empat dimensi di antaranya, mengakar di masyarakat, otonomi, kekuatan partai dan koherensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dimensi mengakar di masyarakat; Partai Hanura belum begitu dikenal di tengah masyarakat Kota Padang. Dimensi kekuatan organisasi; Partai Hanura minimnya keterlibatan kader dalam berbagai kegiatan partai. Dimensi Koherensi; banyaknya kader senior partai memilih mundur dari partai. Adapun faktor lainnya yang mengakibatkan turunnya suara Partai Hanura dikarenakan oleh rekrutmen caleg yang baru di dunia politik dan tidak dikenal masyarakat serta apa adanya, efek ekor jas Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019, serta kepemimpinan pengurus partai yang tidak bisa mengayomi dan merangkul para kader partai.

Kajian ketiga ditulis oleh Fransiska (2022) dengan judul “*Eksistensi Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa*”. Penelitian ini menjelaskan dan menguraikan tentang eksistensi partai Islam dan keberhasilan partai politik yang berasaskan Islam di daerah tersebut menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan perolehan kursi partai Islam di atas 30%. Tentunya kondisi ini berbanding terbalik dengan isu identitas politik yang dibangun oleh partai – partai tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan partai politik yang berasaskan Islam di Kabupaten Mamasa adalah, merekrut

kandidat dari kalangan nonmuslim dan mencitrakan diri sebagai partai pluralis. Sementara penerimaan masyarakat terhadap partai politik Islam di Kabupaten Mamasa dikarenakan asas partai tidak mempengaruhi perilaku pemilih dan isu identitas agama tidak mempengaruhi perilaku pemilih.

Kajian ke empat yang ditulis oleh Salmi (2022) dengan judul “*Dinamika Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2020*”). Penelitian ini menjelaskan bahwa KPU Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam hal mengatasi partisipasi pemilih yang fluktuatif sekaligus untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar. Adapun upaya-upaya yang dilakukan KPU yaitu Perekrutan penyelenggara anggota AdHoc dengan menggunakan sistem CAT, pendataan pemilih di damping aplikasi E-Coklit, merekrut anggota relawan demokrasi, Memaksimalkan kerja rantai SDM, melakukan sosialisasi berkelanjutan secara langsung dengan membuka ruang untuk setiap stakeholder masyarakat di Kota Makassar, memaksimalkan sosialisasi di media sosial dan mengait influencer Tumming-Abu.

Meskipun KPU Makassar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih namun hasil yang ditunjukkan belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan melihat pergerakan tingkat partisipasi di Kota Makassar yang masih dalam posisi yang fluktuatif. Berdasar atas beberapa fakta dan realitas yang terjadi, kondisi ini kemudian menjadi menarik untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Makassar dan apa yang mejadi penghambat KPU Kota Makassar dalam mengatasi partisipasi yang fluktuatif. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut belum bisa berjalan secara maksimal, ini dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami KPU Kota Makassar. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya kondis covid dan cuaca buruk pada hari H pemilihan, protokol kesehatan dan ketakutan terhadap penyebaran covid-19 , belum akuratnya data pemilih, aturan regulasi yang multi tafsir, keterlambatan pendistribusian C pemberitahuan. Dan terakhir masi kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih pada pemilihan walikota dan wakil Walikota Makassar tahun 2020.

Kajian kelima yang ditulis oleh Santo (2021) berjudul *Komunitas Masyarakat Dan Politik : Peran Dan Pengaruh Komunitas Masyarakat Dalam Pilkada Di Kota Makassar Tahun 2021*. Penelitian ini berfokus pada segmen komunitas yang bukan dibentuk oleh aktor politik maupun partai politik melainkan komunitas yang bersifat bebas dari ikatan dan sudah ada jauh sebelum pelaksanaan pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tautan politik antara komunitas dan pasangan kandidat Danny-Fatma dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe metode penelitian kualitatif serta jenis metode deskriptif analitis. Data yang diperoleh menggunakan hasil wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa benar adanya tautan politik diantara mereka, Kandidat Danny-Fatma dan para komunitas paguyuban pendukung mempunyai kepentingan masing-masing yang saling bertemu pada saat pilkada sehingga terjadinya tautan politik elektoral. Kemudian tipe tautan politik elektoral mereka memiliki kecenderungan bersifat programmatik dan juga ada yang bersifat klientelistik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan deskripsi sebuah kasus secara metode kualitatif dengan penekanan pada sebuah analisis, dan diperkuat oleh data-data yang didapat dilapangan. Selanjutnya, dalam penelitian dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai analisis tersebut. Sehingga metode kualitatif merupakan metode sebagai cara guna mengeksplorasi serta memahami pesan sejumlah masyarakat pribadi maupun secara kelompok yang berangkat dari permasalahan sosial dan *humanity*.

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan data kualitatif, data ini merupakan bentuk kata, gestur tubuh, ekspresi wajah, kalimat perkalimat, bagan, foto dan gambar. Metode kualitatif juga kerap disebut metode konsrtutif. Sebab, dapat ditemukan data yang bertebaran dan kemudian dapat dikonstruksikan dalam sebuah tema yang focus dan dapat mudah dicerna (Creshwell, 2011).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti bukan data yang didapat melalui perantara seperti media dan sebagainya atau dapat disebut data utama. Dalam hal tersebut data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pimpinan DPW PPP JAWA TENGAH, pengurus maupun para kader dan simpatisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data kedua setelah data primer, data ini guna sebagai penguat, data sekunder didapat melalui perantara, peneliti dapat memperoleh data ini melalui berupa bukti pada umumnya, catatan maupun laporan secara historis yang telah tersusun dalam data arsip (data dokumenter) dengan sudah dipublish maupun yang tidak dipublish (Creshwell, 2011).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sebuah informasi yang terdapat dan diperoleh dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dan dapat dianalisis

dengan metode tertentu (Tanzah, 2009:52). Pada pengumpulan proses data yang akan diperoleh, peneliti melakukan metode pengumpulan data berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai media guna mendapatkan informasi tertentu yang perlu digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, wawancara yang baik adalah wawancara yang berhasil menguak informasi yang dibutuhkan dapat terambil sesuai dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan sebagai bahan penelitian (Tanzah, 2009:59). Penelitian yang dilakukan saat ini mempunyai beberapa target narasumber inti dari kepemimpinan DPW PPP JAWA TENGAH sebagai tempat penelitian yaitu Masruhan Syamsurie sebagai Ketua DPW PPP JAWA TENGAH, Ngainirrichardl Wakil Ketua DPW PPP JAWA TENGAH, kemudian Adapun para kader maupun pengurus DPW PPP Jawa Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan sebagai bukti penunjang berupa potret gambar dan foto dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan akan mengambil gambar apapun yang berkaitan dan kiranya perlu dimuat dalam penelitian sebagai data yang berpengaruh keasliannya dan keotentikan peneliti pribadi secara langsung. Hasil yang dimaksud adalah gambar dari observasi dilapangan berupa wawancara maupun tempat yang bersangkutan dengan mendapatkan perzinan oleh pihak terkait (Tanzah, 2009:61).

4. Teknik Analisis Data

Observasi yang telah dilakukan melalui wawancara akan menghasilkan sebuah data. Selanjutnya, data tersebut akan lebih matang dan dalam apabila dikaji dan dianalisis secara baik dan benar sesuai dengan proses penelitian, Teknik ini dapat dimulai dari proses penyusunan, pendalaman satu data ke data yang lain sehingga dapat dikategorikan serta menyuguhkan dengan teori-teori yang digunakan sebagai maksud memberikan jawaban atas Analisa (Sugiyono, 2009:87).

Teknik Analisa data guna mereduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan kesimpulan yang matang serta verifikasi (*concluding drawing*) (Sugiyono 2009:91). Reduksi data guna pemilihan dan perangkuman data sebagai

data penting yang terkait dengan berkaitan topik penelitian sebagai tujuan sarana mempermudah pemahaman bagi peneliti dari data yang diperoleh.

Langkah berikutnya melakukan sajian data. Proses ini dilaksanakan setelah data tersaji, peneliti akan dapat memahami dengan mudah serta mendapatkan Analisa dari perolehan data dilapangan kemudian dari penyajian data tersebut digunakan sebagai proses untuk melanjutkan perencanaan Langkah berikutnya, Analisa data akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang merupakan hasil yang penulis lakukan dari pendalaman kajian penelitian. Dalam pembahasan penelitian yang dilakukan ini maka kesimpulan dari seluruh proses Analisa data yaitu mengetahui pelebagaan partai politik DPW PPP JAWA TENGAH dalam kontestasi pemilu.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan memaparkan sebuah alasan yang melatar belakangi penelitian ini, yang selanjutnya menjadikan perumusan dalam rumusan masalah. Disisi lain pendalaman mengenai tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian yang dilakukan akan dijelaskan secara gamblang. Dalam Bab I peneliti menguraikan metode, pendekatan, penggunaan, konsep serta bagaimana tahapan penelitian ini mejadi sebah penulisan karya utuh dalam bentuk skripsi.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan secara focus pada kerangka teori yang digunakan pada penelitian. Penjabaran secara luas terkait kerangka toeri guna dapat menjadi acuan dengan mudah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAMIKA PARTAI POLITIK

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi DPW PPP Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Peneliti akan menjelaskan tentang Ke-DPW-an PPP Jawa Tengah.

BAB IV

DIMENSI INTERNAL SYSTMENESS DAN VALUE INFUSION

Bab ini akan dijelaskan serta diuraikan kesisteman dalam partai politik ialah proses pelaksanaan fungsi partai yang dilakukan menurut urutan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai, baik formal maupun non formal, ditetapkan dalam

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Selanjutnya, Identitas nilai partai politik yang didasarkan atas ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya dan indentifikasi terhadap pola dan arah perjuangan partai.

BAB V

DIMENSI EKSTERNAL DESISIONAL OTONOMI DAN REIFICATION

Pada Bab V menjelaskan bagian selanjutnya yang berkaitan mengacu pada ketergantungan partai pada aktoraktor eksternal otonomi dan selanjutnya pembahasan berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelma sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif kepada publik.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab vi merupakan penjelasan kesimpulan dari karya penulisan yang telah tergabung menjadi sebuah penelitian yang disebut skripsi. Hal ini dilakukan sebagai akhir dari hasil kajian penelitian yang membawakan alasan dalam latar belakang sehingga timbul rumusan masalah yang perlu jawaban. Selain akhir dari penelitian, pada bab ini juga disajikan kepada penelitian serupa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi sumber-sumber referensi yang digunakan oleh penulis guna penyusunan sebuah skripsi.

BAB II

POLITICAL PARTY, SYSTEMNESS, VALUE INFUSUION, DECISIONAL AUTONOMY, REIFICATION

Pembahasan dalam bab ini berisi fokus kajian yang terdapat pada kerangka teori. Untuk menentukan sudut pandang masalah terhadap objek yang telah dipilih (Hadari, 1987: 40). Untuk mengkaji lebih dalam terkait pelebagaan DPW PPP JAWA TENGAH. *Pertama*, Penulis akan memberikan gambaran tentang konseptual partai politik, kemudian *Kedua*, penulis menjelaskan kerangka teori menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Randall dan Svasand (2002).

Randall dan Svasand mengartikan pelebagaan partai politik adalah "*The process by which the party becomes established in terms of both intergeted patterns on behavior and attitudes and culture*". Artinya bahwa pelebagaan partai politik ialah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku, selain itu dalam sisi kultural partai politik mempolakan sikap dan budaya (Randall dan Svasand, 2002). Dari pengertian partai politik Randall dan Svasand (2002) mereka berdua menggabungkan teori dari beberapa ahli, sehingga muncul beberapa pengukuran sebuah pelebagaan organisasi partai politik. *Pertama, systemness, Kedua value infusuion, Ketiga, decisional autonomy, Keempat reification*. Ke empat unsur tersebut saling bertemu dalam persilangan aspek internaleksternal dan apsek struktural-kultural. Jika suatu parpol bisa mengelola ke-empat unsur tersebut dengan baik, maka parpol dapat dikatakan mengalami pelebagaan yang optimal (Efriza, 2012:240).

Teori Randall dan Svasand telah banyak digunakan dari penelitian sebelumnya, Tidak hanya meninjau dari penelitian sebelumnya peneliti membaca teori-teori dari beberapa ilmuwan untuk membandingkan teori mana yang lebih tepat untuk digunakan. Teori Randall dan Svasand lebih spesifik dalam hal pelebagaan partai politik, sehingga dapat dipustuskan peneliti menggunakan teori besutan dua ahli tersebut.

A. Partai Politik

Partai berasal dari bahasa latin Maurice Duveger menyebutkan "*partire*", yang bermakna membagi (Labolo & Ilham, 2015). Dengan demikian dari pengertian tersebut kita bisa memaknai bahwa partai merupakan sebuah bagian

maka ada bagian bagian lainnya. Partai merupakan bagian paling penting disebuah negara demokrasi. Meskipun awal dari kehadiran partai banyak yang menilai negatif. Robespierre orator agigator revolusi Perancis menyatakan partai politik hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pimpinan” (Efriza, 2012).

Partai politik (*political party*) merupakan sebuah cerminan negara yang demokratis. Clinton Rossiter dalam buku sampul Richard & William (2014) menyebutkan bahwa “Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai”. Pada hakikatnya suatu negara yang partai politik adalah bentuk manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sosial sesuai dengan kepentingan masyarakat. Keberadaan partai juga dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan hak asasi manusia, karena partai bentuk suatu kebebasan berserikat dan hidup berorganisasi. Richard H. Pildes dalam Labolo dan Ilham (2015) mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, hak asasi manusia dapat berkurang karena dalam diri seseorang tidak dapat menyatakan kebebasan pendapat. Dalam perjalanan waktu kehadiran partai dalam sistem demokrasi modern dianggap bagian paling penting dari demokrasi modern.

Untuk memahani lebih lanjut tentang pengertian partai politik berikut definisi partai politik menurut para ilmuwan politik: Edmund Burke (1770) dalam Richard dan William (2014) mendefinisikan partai politik kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama, mereka berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka sepakati bersama. Schlesinger (1991) dalam Richard dan William (2014) mendefinisikan partai politik kelompok yang terorganisir untuk mendapatkan kontrol pemerintahan atas nama kelompok itu dengan memenangi pemilihan-pemilihan jabatan publik Dalam definisi ini partai politik menjadi kendaraan untuk mencapai kekuasaan atau jabatan jabatan tertentu.

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik ialah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2008:404). Berbeda dengan organisasi-organisasi lain partai politik mengikuti pemilu untuk mendapatkan menduduki jabatan kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik serta hingga mempertahankan kekuasaan

yang sudah diperoleh. Sartori dalam Budiarjo (2008:404) mendefinisikan partai politik suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (A party is any political group that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office). Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat simpulkan partai politik ialah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dengan tujuan untuk menguasai atau merebut pemerintahan. Untuk dapat meraih tujuan tersebut partai menempatkan anggotanya dalam pemerintahan melalui pemilihan umum. Sementara secara umum partai politik mempunyai fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, kontrol politik (Surbhakti, 2010).

B. Pelembagaan Partai Politik

Dalam konsep mengenai pelembagaan partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah konsepsi pelembagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand. Menurut Randall dan Svasand (2002:12) pelembagaan partai politik suatu proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam rangka mempolakan sikap atau budaya (*The process by wich the party becomes established in term of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*).

Tabel 2.1 Dimensi pelembagaan partai politik versi Randall dan svasand

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Ke-sika-pan	Identitas Nilai	Citra Publik

Sumber: Randall dan Svasand 2002

Dalam tabel diatas Randall dan Svasand (2002:13) membagi proses dua aspek pelembagaan partai politik. Pertama aspek internal-eskternal dan aspek strutural-kultural. Kemudian kedua aspek disilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua,

persilangan aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infusion*). Ketiga persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan citra publik (*reification*). Dari beberapa persilangan tersebut menghasilkan 4 aspek yang akan dibahas dibawah ini.

1. Derajat Kesisteman (*Systemnes*)

Kesisteman (*Systemnes*) dalam partai politik ialah proses pelaksanaan fungsi partai yang dilakukan menurut urutan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai, baik formal maupun non formal, ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya menurut AD/ART yang dirumuskan bersama (Randall dan Svasand, 2002).

Menurut Randall dan Svasand (2002) derajat kesisteman ini dapat diukur dari: pertama, asal usul partai politik (*origins*). Kedua, sumberdaya (*Resource*) atau disebut juga keuangan atau pendanaan. Ketiga kepemimpinan (*leadership*), lebih melihat siapa yang lebih menentukan didalam partai. Seorang pemimpin partai yang disegani atau kedaulatan anggota yang ditentukan oleh organisasi sebagai satu kesatuan. Keberadaan pemimpin yang mengandalkan kharisma menjadikarakteristik partaipartai dalam negara ketiga. Kharisma pemimpin sangat berperan positif dalam pendirian partai untuk menjaga koalisi partai dominan. Partai yang bergantung pada kharisma pemimpin memang pada awalnya akan melejit tapi jika partai tersebut masih bergantung dengan tokoh pemimpin tersebut, maka partai tidak akan pernah terlembagakan. Keempat faksionalisme menyoroti siapa aktor yang membentuk atau menentukan faksi-faksi. Terakhir implikasi klientalisme menyelidiki bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, apakah klientalisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau berdasarkan aturan main dalam konstitusi partai.

2. Identitas Nilai

Identitas partai politik (*Value infusion*). Identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya dan indentifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai tidak

hanya terlihat pada pola atau arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial pendukung. Partai dalam memperjuangkan kebijakannya tidak hanya mengandalkan kekuatan dari diri sendiri, partai juga memanfaatkan organisasi-organisasi sayap atau organisasi pendukungnya (Randall & Svasand, 2002).

Menurut Khikmawanto (2021) Identitas nilai partai tidak hanya hubungan partai dengan kelompok populis tertentu, atau dengan kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh klientalisme dalam organisasi, apakah hubungan partai dengan anggota bersifat formalitas atau lebih bersifat ideologis yang anggotanya mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identitas partai. Partai yang mempunyai basis pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas yang jelas.

Partai politik yang boleh dikatakan melembaga dari segi identitas nilai, ketika partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial). Pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai akan dibawa dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu.

3. Derajat Otonomi

Otonomi keputusan (*Desicional autonomy*) mengacu pada ketergantungan partai pada aktor-aktor eksternal (Randall & Svasand, 2002). Aktor-aktor tersebut ialah otoritas tertentu (penguasa), sumber dana (pengusaha atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa. Hal yang terpenting dari dimensi ini adalah: pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen. Kedua, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai.

Ketergantungan partai terhadap aktor eksternal akan memberikan dampak bagi partai itu sendiri. Kehadiran para aktor luar cenderung menyebabkan pelembagaan partai menjadi lemah karena sumber dukungan pimpinan dan objek loyalitas dipengaruhi oleh pihak aktor tersebut. Dari sini bisa menjadi ukuran otonomi keputusan dimana suatu partai politik bisa disebut melembaga jika keputusannya tidak dipengaruhi pihak luar (Randall & Svasand, 2002)

Meski didalam teori otonomi dan kesatuan adalah karakter yang terpisah, namun dalam prakteknya kedua unsur ini saling bergantung satu sama lain. Huntington (1983) menekankan pentingnya partai politik untuk memperkuat kelembagaan politik, karena partai politik mengorganisir partisipasi politik dan memengaruhi batas-batas sampai mana partisipasi tersebut bisa diluaskan. Stabilitas, kekokohan, partai dan sistem kepartaian tergantung dengan cederajat pelembagaan partai politik.

4. Pengetahuan Publik/Reifikasi

Reifikasi partai, mengacu pada sejauhmana suatu partai politik dipandang baik oleh masyarakat (Randaall dan Svasand 2002). Reifikasi berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelma sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif kepada publik. Dalam mendapatkan suara banyak dari konstituen, reifikasi partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai telah tertanam pada imajinasi publik maka pihak lain, baik individu atau lembaga. keduanya akan menyesuaikan aspirasi, harapan, sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.

Reifikasi juga dapat dilihat dari umur partai politik. Semakin tua umur suatu partai politik makin jelas citra atau pengetahuan publik mengenai partai tersebut (Khikmawanto, 2021). Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mengetahui wajah dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (platform) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan tindakan tertentu dan tidak melakukan tindakan lain.

BAB III

DPW PPP JAWA TENGAH

Diskusi dalam bab ini akan membahas konsep partai politik islam sebagai objek pertimbangan dalam penggunaan teori pelebagaan yang akan digunakan untuk melihat partai patai politik sudah terlebaga atau belum dalam menjalankan pelebagaannya. Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi DPW PPP Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Peneliti akan memberikan deskripsi sejarah latar belakang yang berkaitan dengan Ke-DPW-an PPP Jawa Tengah.

A. Founding Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi symbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam (Zuly, 2012).

Pengalaman PPP dalam menjangkau politik elektoral perolehan suara dan kursi di Pusat, apa yang telah diperlihatkan PPP ini semakin kehilangan dukungan, kecuali pada Pemilu 1977. Bahkan jumlah kursi PPP pada Pemilu 1977 (99 kursi) ini sedikit lebih tinggi dari jumlah total kursi partai-parati Islam pada Pemilu 1971 (94 kursi dengan rincian NU 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PSII 10 kursi dan Perti 2 kursi), Meskipun demikian perolehan kursi PPP pada Pemilu 1977 tersebut jauh lebih sedikit dari total kursi yang diperoleh partai-partai Islam pada Pemilu pertama tahun 1955. Pada Pemilu pertama ini Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PSII 8 kursi dan Perti 4 kursi. Jumlah total perolehan adalah 114 dari 257 kursi yang diperebutkan.

Sejak Pemilu 1977 sampai Pemilu 1987 perolehan suara maupun kursi PPP terus menurun. PPP baru mengalami kenaikan, itu pun hanya satu kursi, pada Pemilu 1992. Kenaikan yang dialami PPP pada Pemilu 1997, meskipun jumlah kursinya tidak bisa seperti Pemilu 1977. Pencapaian PPP yang terburuk dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, baik di masa Orde Baru maupun di era Reformasi terjadi pada Pemilu 2019. Di masa orde baru, PPP selalu berada

pada urutan kedua setelah Golkar. Pemilu pertama (1977) PPP mendapatkan 99 kursi. Pada Pemilu berikutnya tahun 1982 memperoleh 94 kursi, turun 5 kursi. Penurunan perolehan kursi ini mungkin sekali akibat banyaknya tokoh (Kiyai) PPP yang saat itu mulai pindah ke GOLKAR seperti KH. Zubair dari Jateng dan KH. Mustain Romli dari Jatim.

Pemilu 1987 PPP mengalami penurunan perolehan kursi maupun suara cukup tajam dari 94 kursi menjadi hanya 61 kursi. Padahal total kursi yang diperebutkan bertambah dari 360 menjadi 400 kursi. Kursi yang diperebutkan bertambah tapi perolehan kursi PPP malah menurun. Salah satu faktor penyebab penurunan ini mungkin karena PPP tidak menggunakan asas Islam lagi. Sebagaimana disebutkan di atas, sejak tahun 1984 PPP tidak lagi menggunakan asas Islam. Akibat dari kebijakan politik ORBA ini banyak tokoh agama yang kemudian meninggalkan PPP karena beranggapan PPP saat ini sudah tidak ada bedanya dengan partai-partai yang lain. Banyak tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang semula mendukung PPP pindah ke GOLKAR. Pemilu 1987 ini bisa dikatakan sebagai puncak exodus pemilih PPP ke GOLKAR.

Setelah penurunan suara yang cukup tajam pada Pemilu 1987, pada Pemilu 1992 perolehan kursi PPP naik 1 (satu) kursi, dari 61 menjadi 62 kursi, suatu kenaikan yang tidak terlalu berarti. Meskipun demikian, pemilu 1992 ini bisa menjadi ukuran bagi militansi kader. Para pemilih pada Pemilu 1992 ini benar-benar merupakan kader ideologis yang fanatik dan memiliki keterikatan rasional maupun emosional yang kuat terhadap partai. PPP baru mendapatkan perolehan kursi yang cukup banyak (89 kursi) pada Pemilu 1997, saat kekuatan ORBA mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahannya.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, menandakan berakhirnya kehidupan politik ORBA dan dimulainya babak baru kehidupan politik orde reformasi. Kebebasan politik mulai terasa, banyak orang yang mulai ekspresif dan berani membicarakan masalah politik yang dulu dianggap tabu. Setelah sekian lama demokrasi dikebiri, akhirnya pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan Pemilu pertama kali di era reformasi. Pada Pemilu 1999 ini partai Islam tidak hanya diwakili PPP tapi ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan banyak lagi partai-Islam kecil dengan jumlah dibawah lima kursi.

Saat Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi dari total 462 kursi yang diperebutkan, dan menempatkan PPP pada urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar. Namun pada Pemilu 2004, meskipun jumlah kursi yang diperoleh sama dengan jumlah kursi pada Pemilu 1999 yakni 58 kursi, pada hakekatnya mengalami penurunan karena jumlah total kursi yang diperebutkan adalah 550. Pada Pemilu 2009 lebih turun lagi, PPP hanya mendapatkan 38 dari total 560 kursi, sedangkan pada Pemilu 2014 memperoleh kenaikan 1 kursi, menjadi 39 dari total 560.

Periode 2014-2019 merupakan masa-masa penurunan suara bagi PPP. Bukan hanya karena turunnya angka suara perolehan, tetapi dilanda perpecahan dengan munculnya dua kepemimpinan dalam tubuh PPP, tapi juga ditangkapnya dua pimpinan PPP. Romahurmuzy (Romy) terkena OTT KPK di kantor Kanwil Kemenag Jatim pada tanggal 15 Maret 2019. Empat tahun sebelumnya, pada tanggal 23 Mei 2014 KPK menyatakan Surya Darma Ali (SDA) sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Itulah karenanya Pemilu 2019 merupakan yang terburuk. PPP kehilangan separoh lebih dari kursi yang pernah diperoleh pada Pemilu sebelumnya.

Melihat sebelumnya mendapatkan 39 dari total 560 kursi, maka pada Pemilu 2019, PPP hanya mendapatkan 19 dari total 575 kursi yang diperebutkan. Perolehan 19 kursi ini telah menempatkan PPP pada urutan ke 9 atau terakhir dari parpol peserta Pemilu yang lolos parliamentary threshold.

1. Partai Persatuan Pembangun

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah:

Tabel 3.1 Para Deklarator Partai Persatuan Pembangunan

No	Nama	Organisasi
1.	KH. Idham Chalid	Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama
2.	H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH	Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
3.	H. Anwar Tjokroaminoto	Ketua Umum Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)
4.	H. Rusli Halil	Ketua Umum Partai Islam (Perti)
5.	H. Masykur	Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR

Sumber: Dokumen DPW PPP Jawa Tengah

Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H. Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Masykur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.

Awal berdiri PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah. Namun sejak tahun 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu, ini disebabkan karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima berdasarkan Mukhtamar I PPP tahun 1984. Dalam perjalannya, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak tumbang-nya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998 berdasarkan kesepakatan dalam Mukhtamar

IV akhir tahun 1998. PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai menggunakan asas Islam.

2. Aklamasi Muktamar

Pada Muktamar I PPP tahun 1984, PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie. Sejak dideklarasikan pada tahun 1973, PPP berasaskan Islam dan menggunakan lambang Ka'bah. Namun pada tahun 1984, karena ada kebijakan dari pemerintahan Soeharto atau ORBA yang mengharuskan semua Organisasi Sosial Politik (Orsospol) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggunakan asas Pancasila, PPP pun kemudian menggunakan asas Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejak Muktamar 1984 selanjutnya lambang Ka'bah pun dirubah menjadi lambang bintang dalam segi lima. Lambang Ka'bah baru digunakan kembali setelah ORBA tumbang yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah ORBA tumbang, bukan hanya lambangnya yang berganti, tetapi asas yang digunakannya pun berubah menjadi asas Islam. Perubahan lambang dan asas ini dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Kemudian, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala.

PPP merupakan partai politik penerus estafet partai islam wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa T'a'ala melalui perjuangan politik. PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

GAMBAR 3.1 Logo Partai Persatuan Pembangunan



Sumber: Dokumen DPW PPP Jawa Tengah

Tabel 3.2 Filosofi Logo PPP

No	Simbol	Arti
1.	Ka'bah	Merupakan simbol pemersatu Umat Islam.
2.	Ka'bah	Bagi Partai Persatuan Pembangunan merupakan symbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.
3.		Lambang Partai Persatuan Pembangunan adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar Aswad tepat pada sudut dinding, dibawah gambar ka'bah bertuliskan PPP bewarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan diatas warna hijau dalam bingkai segi empat sama sisi berwarna kuning emas

Sumber: AD /RT Ketetapan Mukhtamar VII Partai Persatuan Pembangunan 2016

3. Platform Partai Persatuan Pembangunan

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah *Subhanahu wa T'a'ala* kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (*addien*) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (*syariat*) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (*rahmatan lil alamiin*).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama'ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sertasalah as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlusunnah wal jama'ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (*rahmatan lil „alamiin*). Paham keagamaan ahlussunnah wal jama'ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (*tatharruf*), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan Partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar sebuah tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (*ideological party apparatus*) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) Partai, yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai Partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

4. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan

Penjelasan AD/ART PP tentang Asas, Sifat, dan Prinsip PPP dengan dasar berasaskan Islam dengan bercirikan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, Bersifat Nasional, Prinsip-prinsip perjuangan PPP membawakan prinsip Ibadah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan, prinsip istiqamah

a. Visi PPP

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah

b. Misi PPP

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya paham atheisme, komunisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memerhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme,

liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

Berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang wenangan yang mendzalimi rakyat.

Memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

5. Struktur Organisasi Partai Persatuan Pembangunan

Dalam penjelasan AD/ART PPP pasal 15 tentang Struktur Organisasi Kepemimpinan PPP, yaitu, organisasi tingkat nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP, organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PAC PPP, organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR PPP, Organisasi ditingkat negara atau gabungan negara di luar Indonesia berkedudukan

di wilayah negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPLN PPP.

6. Tujuan PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

B. DPW PPP Jawa Tengah

1. Perjalanan DPW PPP Jawa Tengah

Saat ini kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah periode 2021-2026 dipimpin oleh Masruhan yang menjabat sebagai Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024. Masruhan merupakan Ketua DPW PPP Jawa Tengah yang telah menjabat selama dua periode. Masruhan terpilih sebagai Ketua DPW dalam Musyawarah Wilayah VIII Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah tak dapat dilepaskan dari representasi umat islam dalam politik kenegaraan, sekaligus representasi fragmentasi kelompok Islam politik substantial. Karena itu PPP aktif sebagai

perantara aspirasi masyarakat muslim untuk dapat memberi perannya sebagai partai islam dalam membawakan aspirasi islam ke dalam kebijakan negara dan pemerintah, melalui kekuatan-kekuatan anggota PPP yang mempunyai jabatan di setiap Lembaga.

Ketua DPW PPP Jawa Tengah yang berpotensi dan berkiprah lebih dalam meningkatkan suara PPP di Jawa Tengah, adalah KH. Achmad Thoyfoer yang juga sangat dekat dengan KH. Maimoen di PPP, menjadikan Kiai Maimoen sebagai panutan dalam karir politiknya. KH. Thoyfoer yang menjadi sentral simpatisan tokoh agama islam dan kader PPP di Jawa Tengah meninggal tahun 2007 sehingga pengaruhnya pada saat itu kembali beralih ke KH. Maimoen Zubair. Kemudian anak-anak KH. Thoyfoer yang melanjutkannya dalam jenjang politik dengan sepeninggalannya menjadi murid politik dari KH. Maimoen Zubair. Melihat juga dari posisi Kiai Maimoen tidak hanya sebagai sentral di Jawa Tengah, tetapi juga di PPP pusat dan jajaran Kiai NU di Indonesia, karena ia adalah kiai yang paling disepuh-kan atau dituakan serta kharismatik sehingga menjadi alasan KH. Thoyfoer untuk mengikuti KH. Maimoen.

KH. Achmad Thoyfoer sebagai sentral di Jawa Tengah, seluruh masyarakat mengenalnya dan ikut terlibat berbagai kegiatan yang ia buat untuk masyarakat. Bagaimanapun juga untuk menjadi seorang sentral, KH. Thoyfoer memiliki strategi dakwah tersendiri agar dirinya memiliki power untuk mempengaruhi masyarakat. KH Thoyfoer di kenal karena kepiawaiannya saat menjadi anggota dewan. Bagi orang PPP, KH Thoyfoer merupakan salah satu contoh politisi yang paling santun dan cerdas. Oleh karenanya, PPP juga sangat bergantung kepada KH Thoyfoer dan menurun hingga ke anak-anaknya. Putra putri KH. Thoyfoer yang terjun ke politik diantaranya ada Gus Arwani atau yang biasa dikenal dengan Gus Aang dan Gus Aziz, kemudian anak perempuan yang terakhir yang akan merintis ke jalur politik yaitu Nadia Fathimah Thomafi dengan menjadi salah satu caleg DPR RI 2019. Selain itu, anak perempuan lainnya juga menjadi salah satu ketua WPP PPP Rembang. Ia adalah Ning Jannah istri dari Gus Azis.

Tabel 3.3 Daftar Urutan Ketua DPW PPP Jawa Tengah

No	Nama	Tahun
1	H. Djoremi	1973- 1982
2	H. Achmad Karmani, SH	1982-2001
3	KH. Achmad Thoyfoer MC	2001-2007
4	Drs. H. Hisyam Alie	2007-2011
5	Dr. H. Arief Mudatsir Mandan, MSi., MM	2011-2015
6	H. Masruhan Syamsurie	2015-2021 , 2021-2026 (Sekarang)

Sumber: Dokumen DPW PPP Jawa Tengah-Daftar Ketua

Secara struktural, urutan kepemimpinan DPW PPP Jawa Tengah dari tahun ke tahun tentunya di mulai dari H. Djoremi pada tahun 1973-1982. Setelah selesai tahun kepemimpinan H. Djoremi, roda organisasi DPW PPP Jawa Tengah dipimpin oleh H. Achmad Karmani pada tahun 1982 sampai 2001. H. Achmad Karmani memimpin selama tiga periode. Pada tahun 2001 hingga 2007, posisi ketua kemudian digantikan dan berlangsung oleh KH. Achmad Thoyfur yang kedekatannya dengan KH Maemoen Zubair sangat baik, seorang kiai dan politisi yang sangat terkenal dari Rembang. Pada periode berikutnya, DPW PPP Jawa Tengah dipimpin oleh Drs. Hisyam Alie. Kemudian berganti ketua dari tahun 2011 hingga 2015 oleh Dr. H. Arief Mudatsir Mandan yang meninggal sebelum masa jabatannya habis kemudian digantikan oleh H. Masruhan Syamsurie, Kemudian Masruhan pada Musyawara Wilayah berikutnya mengajukan diri sebagai ketua dan menjadi ketua terpilih dua periode dari tahun 2016-2021 kemudian tahun 2021 hingga 2026.

Saat ada permasalahan pusat yang berpengaruh kepada DPW Jawa Tengah terhadap pemilihan Ketua DPW PP Jawa Tengah sebagai sentral KH. Maimoen ikut andil untuk menyelesaikan. Permasalahan memuncak saat mereka mengadakan Rapat Besar Pengurus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kondisi dalam ruangan ternyata sudah terbelah menjadi dua kubu memanjang. Masing-masing pengurus bisa memilih untuk berada disisi dan kubu sebelah mana. Apakah di belakang Djan Faridz atau Gus Romy. Pada saat itu putra-putra Kiai Maimoen

berada di sisi Djan Faridz, namun Kiai Maimoen ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Ia justru mempercayakan pilihannya kepada Gus Aang putra Kiai Thoyfoer. Seketika di ruangan, Gus Aang tidak menunjukkan dimana dia akan berpihak. Ia justru duduk di tengah-tengah antara dua kubu yang membuat suasana sedikit tidak nyaman.

Hal ini di sebabkan Gus Aang membawa pesan yang diamanahkan oleh Kiai Maimoen. Menurut orang-orang yang ada di dalamnya, Kiai Maimoen hanya berkata "*Pilihanku ono ning Aang, Aang milih sing ndi yo kuwi sing aku pilih*". Melihat hal tersebut menandakan pastinya sudah ada arahan tersendiri dari Kiai Maimoen melalui Gus Aang, hingga akhirnya Gus Aang mengutarakan di hadapan publik dan memihak pada Gus Romy. Itu artinya Kiai Maimoen juga memihak Gus Romy. Beberapa dari pengurus wilayah juga sudah menduga bahwasannya sejak awal Kiai Maimoen berada di pihak Gus Romy. Oleh karena itu sampai saat itu PPP yang resmi dan akhirnya di sahkan oleh Kementrian Agama adalah PPP dari kubu Gus Romy.

Pihak Djan Faridz yang kalah akhirnya menarik diri dari kepengurusan tersebut dan membentuk sendiri PPP versi Djan Faridz. Dirinya membuat muktamar dengan para pengikutnya untuk legal standingnya sebagai partai. Hal yang kemudian terjadi adalah PPP memiliki dua kepengurusan. Memiliki dua DPP, dua DPW dan DPC terbelah ada yang memihak Djan Faridz tetapi juga ada yang memihak Gus Romy. Kondisi terpecah dua kubu ini semakin panas menjelang pemilu 2019. Hal ini disebabkan Djan Faridz yang digantikan dengan Sekretarisnya mendeklarasikan bahwa PPP berada di kubu Prabowo, sedangkan Gus Romy berada di kubu Jokowi. PPP versi Gus Romy melaporkan PPP versi Djan Faridz ke jalur hukum karena memproklamirkan dengan menggunakan lambang partai, nama partai yang mereka anggap tidak sah dan melanggar hukum. Karena PPP dari kubu Gus Romy-lah yang sah dan resmi di akui oleh negara, sehingga pihak Gus Romy merasa keberatan jika kubu Djan Faridz mendeklarasikan koalisi dengan menggunakan lambang dan nama PPP.

Putra dari Kiai Maimoen yang menjadi pengurus partai beberapa beralih ke kubu Gus Romy dan ada satu yang menetap di kubu Djan Faridz. Gus Yasin menjadi salah satu orang yang mendengarkan Abahnya dengan mengikuti kubu

Gus Romy, dan Gus Wafi yang masih teguh berada di kubu Djan Faridz. Gus Wafi menjadi Ketua DPW PPP Jawa Tengah versi Djan Faridz menandingi Masruhan Samsurie Ketua DPW PPP Jawa Tengah versi Gus Romy.

“Pengurus DPW PPP saat itu jumlahnya sangat banyak. Karena Pak Masruhan sebagai Ketua mencoba menggandeng orang-orang dari kubu Djan Faridz untuk masuk dalam struktural DPW PPP. Meskipun tidak semuanya bisa dan tetap ada PPP versi Djan Faridz, tapi kita berupaya supaya PPP Jateng tidak pecah.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Perpecahan menjadikan kedua tubuh PPP tersebut berpotensi pada kehancuran internal DPW PPP Jawa Tengah. Agar hal tersebut tidak terjadi, PPP dari kubu Gus Romy terus berusaha menyatukan kembali PPP dari Kubu Djan Faridz. Karena jika DPW PPP Jawa Tengah sampai terpecah, maka potensi suara yang di peroleh PPP juga akan semakin berkurang. Mengingat banyak tokoh nasional dari Jawa Tengah dan masih menjadi salah satu basis suara PPP.

Peran KH Maimoen menjadi penentu pada masa genting seperti tersebut, dimana ada kedua kubu yang bersiteru dan hanya salah satu yang mendapatkan pengakuan oleh negara. Maka, semestinya hanya dengan mengeluarkan fatwa kepada kubu Djan Faridz untuk bergabung kembali dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan akan tercipta suasana damai kembali. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kiai Maimoen mulai terlihat anaknya Gus Wafi yang berada di kubu Djan Faridz dan sempat bersiteru dengan Gus Yasin, akan tetapi pada akhirnya juga menerima mendukung Gus Yasin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Permasalahan yang sempat terjadi antara Gus Wafi dengan Gus Yasin saat itu adalah kesamaan tawaran sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah dari Calon Gubernur Jawa Tengah yang berbeda. Sebelum Gus Yasin menerima tawaran dari Ganjar Pranowo sebagai calon wakil gubernurnya, ternyata Gus Wafi mendapatkan tawaran sebagai calon wakil gubernur dari Sudirman Said yang mencalonkan diri melawan Ganjar Pranowo. Gus Yasin sebagai adiknya yang

menyetujui dan melanjutkan untuk maju, membuat Gus Wafi kecewa dan tetap bertahan berada di kubu Djan Faridz dan Sudirman Said pada saat pemilu maupun pilkada.

Pencalonan Gus Yasin sebagai calon wakil gubernur tersebut tentunya juga bukan semata-mata ambisi pribadi, tetapi juga atas restu dan dorongan yang di berikan oleh Kiai Maimoen sendiri. Oleh karena itu, jelaslah bahwa posisi Kiai Maimoen sebagai sentral di PPP. Sikapnya menggambarkan bagaimana arah partai bergerak, bukan hanya di masyarakat tetapi juga sebagai bentuk sikap politik partai. Dengan sikapnya yang memihak ke Gus Romy, artinya Kiai Maimoen juga memihak kepada Jokowi dari pada Prabowo. Hal ini di sebabkan permasalahan yang muncul di awal karena Suryadharma Ali memihak kubu Prabowo untuk pemilu 2019, dan ini tidak mendapatkan restu dari Kiai Maimoen dengan menunjukkan sikap keberpihakan kepada Gus Romy. Hingga pada akhirnya ini berujung pada pencalonan Gubernur Jawa Tengah dengan memilih Ganjar Pranowo maju kembali di dampingi oleh anaknya Gus Yasin.

Saat ini, dalam pimpinan Masruhan dalam konsisten berfokus mengemas isu-isu strategis yang menyentuh basis massa diantaranya isu keagamaan yang diusung oleh DPW PPP Jawa Tengah yang dalam waktu pimpinan Masruhan menjabat sudah tidak menjadi monopoli partai islam karena isu-isu agama tersebut sudah menjadi bagian dari tiap partai yang ada bersama partai nasionalis. Sehingga, dalam ideologi partai islam pun tidak hanya mengembangkan dalam isu keagamaan melainkan sebaliknya menjalankan isu nasionalis.

Tabel 3.4 Susunan Pengurus DPW PPP Jawa Tengah

SUSUNAN DAN PERSONALIA	
PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH	
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI 2021-2026	
Ketua	: Masruhan Samsurie
Sekretaris	: Suyono, S.IP, M.Si
Wakil Sekretaris	: Farid Masduqi
Wakil Sekretaris	: Nurfasikha, AMD.
Bendahara	: dr. Hj. Sholeha Kurniawati
Wakil Bendahara	: Fajarsari Christiawan, SE.
Wakil Bendahara	: Umi Dalyuni, S.Pd.I
Wakil Ketua Bidang Fungsional :	
Bidang OKK 1	: H. Abdul Aziz, M.Si.
Bidang OKK 2	: Drs. H. Istajib AS.
Bidang OKK 3	: Abdul Syukur, S.Ag.
Bidang Informasi dan Komunikasi	: Muhamad Ngainirrichadl, SHL., MM.
Bidang Pengelolaan Aset Partai	: Djoko Nurhadi, SH.
Bidang Data dan Digital	: Muhammad Naryoko, M.Si.
Wakil Ketua Bidang Isu Strategis :	
Bidang Dakwah dan Pembangunan Pesantren	: KH. Ahmad Nawawi Kholil
Bidang Buruh, Tani dan Nelayan	: Dra. Hj. Munawaroh Nurhadi
Bidang Media Sosial	: Muhammad Shidqi, S.IP.
Bidang Advokasi dan Hukum	: H. Muhammad Syahir, SH., MH.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil :

1. H. Abu Nafi, SH.
2. Inna Hadianala, SE.
3. H. Nurul Furqon, SE., MM.
4. Hj. Nurul Hidayah Supriati, M.Si.
5. Hj. Nur Hasanah, SH.
6. H. Tubagus Fahmi, SH.
7. H. Syaiful Hakim, SH.
8. Drs. Mujadin PM.
9. H. Yusuf Cahyono, SH.
10. Evi Rahmawati, S.Pd.I.
11. H. Ulwan Hakim, ST.
12. H. Eddi Santoso, S.Pd.

PIMPINAN MAJELIS SYARIAH

Ketua	: KH. Sya'roni Fahrurrozy
Sekretaris	: KH. Dr. Mumtasikin
Wakil Sekretaris	: K. Abdullah Rikza, S.H.
Wakil Sekretaris	: K. Maftuh Hasbi Afifi

PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN

Ketua	: Drs. H. Moh. Endro Suyitno
Sekretaris	: H. Haizul Ma'arif
Wakil Sekretaris	: Lilis Pujiyanti

PIMPINAN MAJELIS PAKAR

Ketua	: Drs. H. Alfasadun, Akt, MM
Sekretaris	: H. Lubabul Fuad
Wakil Sekretaris	: Laelani Mukhafidoh, SH., M.Kn.

Sumber: Pengesahan DPP PPP Susunan Pengurus DPW Jawa Tengah 2021-2026

2. Dinamika elektoral PPP di Jawa Tengah

PPP di provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu partai tua yang masih bertahan dan eksis dalam pemilu. Kehadiran PPP membawakan pengejawantahan pandangan keserasian relasi agama dan negara. Terlebih secara historis Islam merupakan kekuatan terbesar bangsa yang telah berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan dan memajukan Indonesia. Kekuatan Islam ini telah bermetamorfosis kedalam beberapa kekuatan politik Islam yang tidak terbantahkan. Namun dalam dinamika politik mengusung isu agama bukan hal yang mudah dan tidak selalu diminati sehingga kurang efektif dalam mendapatkan suara.

Table 3.5 Perolehan Suara PPP Pemilihan Umum 2019

DAPIL	KAB/KOTA	JUMLAH SUARA
1	KOTA SEMARANG	21,946
2	SALATIGA, KAB. SEMARANG, KENDAL	(4,136) , (63,092) , (35,476)
3	DEMAK, JEPARA, KUDUS	(64,774) , (77,692) , (19,144)
4	REMBANG, PATI,	(54,251) , (27,037)
5	GROBOGAN, BLORA	(47,272) , (60,869)
6	KARANGANYAR, SRAGEN WONOGIRI	(4,547) , (6,105) , (5,038)
7	KLATEN, SUKOHARJO, SURAKARTA	(16,015) , (8,215) , (5,326)
8	BOYOLALI, MAGELANG, KOTA MAGELANG	(10,075) , (64,853) , (1,221)
9	PURWOREJO, TEMANGGUNG, WONOSOBO	(15,115) , (39,761) , (22,513)
10	BANJARNEGARA, KEBUMEN, PURBALINGGA	(37,814) , (43,430) , (30,065)
11	BANYUMAS, CILACAP	(31,669) , (73,626)
12	TEGAL, KOTA TEGAL, BREBES	(43,952) , (5,180) , (51,228)

13	BATANG,PEKALONGAN, KOTAPEKALONGAN, PEMALANG	(30,774) , (24,856) , (14,790) , (45,920)
JUMLAH		1,108,202

Sumber: Buku Pemilu PPP Jawa Tengah-Data Rekapitulasi Suara

Melihat persaingan dengan partai berbasis Islam lainnya, DPW PPP Jawa Tengah masih tertinggal, terlebih dengan PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Demokrat akan semakin tertinggal jauh. Kasus tertangkapnya ketua umum PPP M. Rohamurmuzyi oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama menjadi bagian penurunan suara PPP. Lanjut, kasus itu mencuat ketika PPP sedang mempersiapkan pesta demokrasi pemilu tahun 2019. Praktis penetapan Romy sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan langsung atau tidak langsung telah memperngaruhi elektabilitas dan tingkat kepercayaan terhadap PPP.

Tabel 3.5 Suara Keseluruhan Partai Politik Pemilu 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH TOTAL SUARA
1	PDI-PERJUANGAN	5,951,572
2	PKB	2,703,546
3	GOLKAR	1,705,054
4	GERINDRA	1,622,728
5	PKS	1,236,960
6	PPP	1,108,202
7	DEMOKRAT	954,251
8	PAN	864,666
9	NASDEM	836,911

Sumber: Buku Pemilu PPP Jawa Tengah-Rekapitulasi Suara Partai Politik Pemilu 2019

PPP sebagai partai tua justru kalah dalam perebutan suara dengan partai-partai yang lahir di era reformasi. Sebagai contoh PKB, Gerindra, PKS, PAN dan Nasdem. Partai tersebut suaranya mengungguli PPP. Sementara PDIP yang di era orde baru suaranya selalu juru kunci, kini justru melesat meraih suara paling tinggi. Sebagai gambaran, hasil pemilu 2019 memang menunjukkan PPP tidak mampu

memaksimalkan suara di basis-basis konstituen lama dan pemilih baru yang angkanya relatif besar. Tentu variabel-variabel penyebab perlu mendapat jawaban secara faktual atau empirik sebagai bahan mengangkat kembali popularitas partai.

Perjuangan di masa Orde Baru. PPP termasuk partai yang terkena bonsai dan pengebirian dari kekuasaan yang tidak menginginkan partai ini menjadi besar. Contohnya keluarnya 'arahan' tentang kewajiban monoloyalitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk wajib memilih Golkar. Tentu arahan ini termasuk menjadikan indikasi pemilu selama era orde baru tidak dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber). Luber hanya sekadar retorika. Apalagi jujur dan adil (jurdil) rasanya masih jauh dari harapan. Namun, saat itu ada kecerdikan dan kreasi-kreasi dari tokoh-tokoh PPP di tengah situasi sulit tersebut. Justru pemilu yang jauh dari luber dan tidak jurdil itu dijadikan bahan kampanye besar-besaran PPP untuk mengkritisi kekuasaan yang cenderung otoriter. Harapannya dari sikap kritis tersebut bakal menuai simpati dan dukungan suara yang besar dalam setiap pemilu di era Orde Baru. Sehingga manuver-manuver politik PPP sering menjadi simbol perlawanan dan diperhitungkan oleh kekuasaan birokrasi maupun partai penguasa.

Hingga lahirlah di era itu orator-orator ulung PPP yang disegani kawan dan lawan. Popularitas para orator ini kian menonjol sebagai pendulang suara yang efektif di tataran akar rumput dari pemilu ke pemilu. Di level pusat hingga daerah bermunculan orator-orator yang berani dan piawai dalam berorasi dan bersikap politik yang muaranya untuk membesarkan panji PPP. Hingga lahirlah di era itu orator-orator ulung PPP yang disegani kawan dan lawan. Popularitas para orator ini kian menonjol sebagai pendulang suara yang efektif di tataran akar rumput dari pemilu ke pemilu. Di level pusat hingga daerah bermunculan orator-orator yang berani dan piawai dalam berorasi dan bersikap politik yang muaranya untuk membesarkan panji PPP. Sederet nama KH Idham Kholid, Subchan ZE, HJ Naro, Aisyah Amini yang disebut singa panggung, Hamzah Haz yang kemudian menjadi Wapres di awal reformasi, Mathori Abdul Djalil, Buya Ismail Hasan Metareum merupakan sosok besar bagi PPP. Sepakterjangnya menggetarkan dunia perpolitikan dari pemilu ke pemilu di era orde baru.

“Menurut Masruhan Ketua DPW PPP Jawa Tengah, setidaknya sosok orator-orator itu juga bertebaran di Jawa Tengah. Di masa tersebut sederet 'vokalis' ulung PPP Jawa Tengah yang disegani kawan dan lawan politik tersebut direpresentasikan antara lain oleh H Achmad Karmani SH, KH Achmad Thoyfoer MC, Drs H Robbani Thoha, Djuhad Mahya SH CN, Hj Siti Khodijah dan Harminto Agustono. Kini, ketujuh tokoh vokal tersebut tinggal nama besar untuk dikenang. Mereka seluruhnya sudah berpulang ke Rahmatullah. Ada visi misi, strategi dan irama yang terasa serasi dalam memainkan panggung politik. Mereka ibarat ombak laut yang bergelombang yang menerjang terjang menghembaskan karang. Itulah tujuh vokalis yang gagah berani menerjang kokohnya karang di lautan. Mereka bersemangat dan bergelora dalam menjalankan tugas partai. Desain isu yang dikembangkan terasa semakin membahana ketika kiprahnya didukung media massa. Saat itu ibaratnya tiada hari tanpa berita PPP di koran-koran.” (wawancara, Masruhan, 5 April 2023)

Saat itu Pimpinan PPP di DPW maupun fraksi di DPRD Jawa Tengah juga membuka ruang bagi wartawan atau siapapun untuk bebas liputan di ruang fraksi. Semua wartawan diterima dengan terbuka untuk wawancara dengan siapa dan tentang apa. Hingga ruangan fraksi PPP selalu penuh dengan wartawan dan dijadikan ruang tongkrongan, Maka di ruangan itu tidak hanya sarat konferensi pers dadakan sebagai bahan pemberitaan yang tiada pernah habis, namun juga sarat dengan diskusi tentang berbagai hal. Banyak informasi yang bersifat latar diperoleh wartawan sebagai bahan referensi. Jadi, komunikasi yang tercipta sudah sangat cair hingga dari hati ke hati. Kerap pula ruangan FPPP DPRD Jateng yang dipenuhi wartawan menjadi ajang belajar tentang agama. Maka banyak wartawan yang belajar agama dengan KH Thoyfoer MC dan dengan KH Hisyam Ali.

Suasana kebatinan ini yang berujung tingginya produktivitas berita yang diukir PPP di media massa, menutup pemberitaan tiga fraksi lain, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) representasi dari Golkar dan Fraksi PDI dan F-ABRI. Wartawan merasa hanya di FPPP inilah kami mendapatkan berbagai berita serta anggota FPPP sangat mudah diwawancara. Sehingga wajar para wartawan menjadikan ruang FPPP sebagai pusat titik kumpul dalam liputan. Jaringan birokrasi Pemprov Jawa Tengah pun juga menyoroti keakraban dan intensitas pemberitaan yang begitu masif dari PPP di media massa. Bahkan, kala itu, Wagub II Jateng Ir

Soesmono sempat curhat kepada para wartawan, seolah seperti para wartawan saat itu menjadi wartawannya Pak Thoyfoer semua. Maka para wartawan menjawab bukti dari Pak Thoyfoer memang aktif memberi informasi dan menyediakan diri diwawancara tentang apa saja, sepanjang bisa dijawab. Hal ini yang tidak dimiliki fraksi- fraksi lain.

Akhir dari curahan Wagub, beliau akhirnya membuka diri untuk siap diwawancara sewaktu-waktu tentang apa saja terkait dengan Jawa Tengah, termasuk Pak Gubernur Soewardi juga menyatakan siap memberi informasi dan diwawancara. Pemberitaan berimbang itu, kata Pak Soesmono, sangat penting agar informasi yang dibangun pers terjadi keseimbangan dalam sajian di media massa. Belasan wartawan peliput Pemprov dan DPRD Jawa Tengah akhirnya merasakan kenapa di DPRD Jawa Tengah yang vokal semuanya tokoh PPP.

Tujuannya untuk merangsang para wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah agar dalam menjalankan peran dan fungsi semakin terpacu untuk bekerja kepada rakyat dengan lebih baik. Memacu 100 anggota DPRD Jawa Tengah agar berani untuk bicara vokal, berani lantang ketika mendapati ketidakadilan atau kesewenang-wenangan pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Maka proses pemilihan 10 vokalis DPRD Jawa Tengah versi wartawan dilakukan dan semurni dan seobjektif mungkin. Setiap wartawan yang memunculkan nama anggota DPRD Jwsateng yang dinilai vokal, harus didasari bukti empirik atau fakta otentik tentang seberapa sering pemberitaan calon tersebut di media massa.

Seberapa besar dampaknya yang ditimbulkan terhadap masyarakat, maka hingga terjadi bursa nama dari anggota-anggota DPRD Jawa Tengah sebagai nominasi kemudian dikerucutkan menjadi 10 nama sebagai vokalis DPRD Jawa Tengah. Hasil akhir, dari 10 nama, 6-7 nama diantaranya berasal dari PPP. Sementara 3-4 vokalis yang dari Golkar dan PDI. Ada semacam kesepakatan para wartawan waktu itu untuk memberi nuansa katrolan agar 10 nama tidak semuanya dari PPP. Meski secara fakta dan realitas seperti itu.

“Ada beberapa fokus empirik yang menjadi sorotan. Faktor ketokohan yang mampu menjadikan partai ini hidup dan berkembang dinamis. Basis suara yang jelas dan terukur dalam mendukung PPP di era orde baru, yakni warga NU atau kaum nahdliyin yang selama orde baru dijaga dan dirawat dengan baik, maka untuk saat ini dijadikan sebagai konstituen sejati. Selanjutnya, program-program yang dijalankan PPP harus lebih jelas dan terarah.” (wawancara, Masruhan 5 April 2023)

Kondisi inilah penggoda kader partai untuk melakukan aksi penguatan tokoh dan basis massa dalam organisasi masyarakat PPP sebagai partai berbasis islam, kesesuaian perilaku kader partai islam selalu dihadapkan dengan nilai-nilai keislaman yang diperjuangkan. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan sikap masyarakat yang cenderung lebih permisif terhadap suatu perbuatan amoral termasuk korupsi oleh tokoh partai. Kemudian, kaderisasi dan program-program PPP ke depan mesti memberikan kesempatan untuk menguatkan hifzh al-mal selain tetap mempertahankan perhatian pada agama, jiwa, dan akal. Pengetahuan mengenai ekonomi syariah dapat menjadi program partai yang mesti dipahami oleh seluruh kader, sebagai bagian dari bekal dasar sebelum ikut serta dalam dinamika perpolitikan.

BAB IV

DIMENSI INTERNAL SYSTEMNESS DAN VALUE INFUSION

Diskusi dalam bab ini akan membahas. *Pertama*, dimensi kesisteman yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) secara kompherensif. *Kedua*, dimensi identitas nilai yang berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai politik, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi pola arah perjuangan yang diperjuangkan oleh sebuah partai politik.

Keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Partai politik sebagai wadah kontrol dan aspirasi pemerintah pun juga harus menjunjung tinggi demokrasi yang selama ini mereka perjuangkan. Salah satu prasyarat untuk mengukur tingkat demokrasi partai politik dapat dilihat dari seberapa jauh partai politik tersebut mampu melakukan pelembagaan partainya baik di tingkat internal maupun eksternal (Pamungkas, 2011).

Pamungkas (2011) dalam konteks ini, institusionalisasi atau pelembagaan sebuah partai politik akan sangat ditentukan oleh tingkat profesionalisme dalam pengelolaan partai. Pengelolaan yang dimaksud tentu tidak hanya menjelang digelarnya pemilu, tetapi juga menyangkut rutinitas kegiatan partai. Pengelolaan dan profesionalisme tersebut terdiri dari beberapa aspek penting kehidupan partai. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan ideologi dan kebijakan, aturan main, kekuasaan dan latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinya, rekrutmen dan seleksi kandidat yang duduk di legislatif, serta proses marketing dari partai tersebut. Keprofesionalan dari para staf partai yang menjalankan fungsinya sehari-hari menjadi elemen penting dalam pelaksanaan aspek-aspek di atas.

Profesionalisme partai dalam bekerja itu tentu harus ditopang oleh staf yang profesional dalam menjalankan partai. Profesionalitas itu ditunjukkan dengan kinerja partai yang konsisten dan berkesinambungan (Pamungkas, 2011). Sehingga partai tidak hanya bekerja ketika akan berlangsung pemilu saja, tetapi juga

dilakukan secara berkesinambungan untuk membentuk dan mengartikulasi posisi konstituen. Efeknya, partai harus menjalankan pembagian fungsi-fungsi tertentu seperti rekrutmen dan nominasi kandidat untuk pemilihan, melakukan penelitian terhadap kebijakan dan mempelajari strategi lawan politik dalam pemilu, pembangunan kebijakan, pengelolaan dana untuk memenangkan pemilu, publikasi dan marketing kebijakan partai, mengukur opini publik dan mempelajari mobilisasi dukungan publik.

DPW PPP Jawa tengah merupakan salah satu partai politik berasaskan islam yang menarik untuk dianalisis tingkat pelembagaannya. Karena di Jateng merupakan partai berpengalaman dan salah satu partai tertua yang memiliki massa pendukung cukup besar dan telah banyak dikenal masyarakat. Pelembagaan politik suatu partai sebagaimana telah dipaparkan dapat dilihat dari aspek aspek internal maupun eksternal yang melingkupinya.

A. Derajat Kesisteman

Dalam menaksir derajat kesisteman yang terdapat di DPW PPP Jateng digunakan indikator untuk mengetahui tingkat kesistemannya. Indikator itu adalah, pelaksanaan AD/ART sebagai prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi PPP sebagai partai politik, kemudian melihat tokoh penentu dalam PPP yaitu apakah seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai satu kesatuan. Penentu keputusan partai, yaitu apakah faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan.

1. Pelaksanaan AD/ART

Derajat kesisteman sebuah partai politik dapat dilihat dari pelaksanaan AD/ART partai secara konsisten dan konsekuen. AD/ART merupakan fondasi dasar yang mengatur mekanisme penyelenggaraan partai. Selain itu, AD/ART juga memuat aturan-aturan dasar yang telah disepakati bersama dan berfungsi sebagai pengikat antara anggota dan partainya, garis ideologi serta arah kebijakan partai.

“Menurut Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng Farid Masduqi, AD/ART bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi dasar yang vital untuk melaksanakan kegiatan kepartaian dan menentukan kebijakan politik. Seluruh pengurus maupun kader PPP di semua tingkat wajib taat dan patuh terhadap mekanisme organisasi sesuai dengan apa yang terdapat di AD/ART. “Kuncinya adalah selalu memegang AD/ART. Selalu melihat dan mempertimbangkan melalui AD/ART. Baik soal penyelewengan/pelanggar ataupun masalah yang muncul dalam dinamika partai. Semuanya akan disesuaikan dan diselesaikan menurut yang ada dalam keputusan AD/ART” (wawancara, Farid 7 April 2023)”

Dengan demikian, secara otomatis seluruh fungsi politik yang diemban oleh PPP tidak akan keluar dari apa yang sudah diatur dalam AD/ART. Sejauh ini proses politik yang berlangsung di PPP baik itu di tingkat pusat maupun daerah pun menyesuaikan dengan yang ada di AD/ART.

”Seluruh pengurus dan anggota PPP paham tentang AD/ART dan berusaha menjalankan serta mentaatinya, sehingga tidak sedikit dari kader yang memiliki jiwa perjuangan islam dalam berpartai, sebab mereka di kader dan di didik. Jika ada yang melanggar pasti sudah tahu juga akan konsekuensinya, maka dikembalikan lagi ke AD/ART.” (wawancara, Farid 7 April 2023)

Guna menjaga konsistensi dalam pelaksanaan AD/ART, para narasumber mengatakan, bahwa partai mempunyai badan pengawas yang disebut Komite Disiplin Partai. Badan ini bertugas mengawasi ketaatan kader dalam menjalankan AD/ART partai. Komite Disiplin Partai dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepengurusan partai sesuai tingkatannya. Komite Disiplin Partai ini bertugas memberi rekomendasi kepada pengurus partai di tingkatannya ketika terjadi pelanggaran disiplin partai. Terhadap terjadinya pelanggaran disiplin partai, maka partai dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota partai atas pelanggaran disiplin partai.

Kategori yang terkena sanksi tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP, menjadi anggota dan/atau aktif di partai politik lain atau mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Partai lain dalam jabatan publik yang tidak sejalan dengan keputusan Partai sesuai dengan tingkatannya dan Melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan AD/ART, pengurus partai apabila melanggar kategori tersebut dapat dijatuhkan sanksi dengan setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam seluruh kategori dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PPP sesuai tingkatannya yang ditetapkan secara sah, anggota yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PPP sesuai tingkatannya yang ditetapkan secara sah, setiap anggota yang melanggar ketentuan mencalonkan diri dari partai lain otomatis berhenti sebagai anggota PPP, anggota Melanggar ketentuan sebagai tersangka dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota PPP dan anggota Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dan setiap anggota pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota.

Adapun keringanan atau pemulihan untuk pelanggar yang dimaksud, pihak partai memberikan kesempatan agar diperkenankan kembali menjadi anggota partai, hal ini diatur dalam pasal 14 AD/ART PPP sebagai berikut, setiap anggota yang telah menjalani masa hukuman sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, keanggotaannya dapat dipulihkan kembali berdasarkan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat, kemudian setiap anggota yang dipulihkan sebagaimana diatur dalam AD/ART dapat mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sekretaris Komisi B DPRD Jateng periode 2019-2024 yang juga Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPW PPP Jateng Richard mengungkapkan, fungsi alat partai seperti Lembaga alat Partai dalam prakteknya ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Harus kita akui bahwa semua alat kelengkapan belum berjalan secara optimal, termasuk bidang fungsional partai, yang dikarenakan lemahnya dan keterbatasan SDM” (wawancara, Ngainirrichard 1 April 2023)

Bukti nyata untuk memperkuat jawaban yang diberikan tentang macetnya alat kelengkapan partai itu terlihat dengan kesigapan dan ketidak adanya pensikapan dari internal partai ketika mengetahui ada kadernya yang telah melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai dengan disiplin partai, yakni melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena selalu masih berpikir panjang dan penuh pertimbangan.

Sejumlah nama kader PPP Jateng yang terlibat korupsi tetap dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan bebas dari sanksi disiplin partai. Seperti Bupati Pemalang dalam korupsi total 6 Milyar dan total sejumlah 963 juta diberikan kepada PPP Pemalang dalam bentuk sumbangan , kemudian ada di tingkat nasional seperti mantan Ketua Umum PPP Romy yang terjerat OTT KPK dalam kasus jual beli jabatan dengan total 300 juta diberikan secara bertahap. Akan tetapi setelah bebas dari penjara, PPP kembali menerimanya bahkan menjabat sebagai majelis pertimbangan.

A. Internal DPW PPP Jawa Tengah

Sebelum pelaporan dan penanganan oleh DPP, DPW PPP Jateng melakukan pengawasan terhadap kinerja partai dengan melakukan evaluasi secara internal terhadap perkembangan partai. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap akhir bulan dengan menggelar rapat internal dan bersifat wajib bagi seluruh pengurus PPP di semua jenjang kepengurusan.

“Untuk tingkat DPC (Kabupaten/Kota), monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggelar rapat. Rapat itu biasanya diselenggarakan setiap bulan sekali dari DPW mengirimkan anggota sebagai perwakilan. Di tingkat Daerah (Provinsi), rapat evaluasi dan pembahasan agenda partai diselenggarakan setiap tiga bulan sekali,” (wawancara, Farid 7 April 2023)

Rapat koordinasi secara internal yang dilakukan oleh pengurus partai memegang peran penting. Selain, dinamika politik yang berkembang dilapangan dapat diketahui, rapat juga menilai dan mengevaluasi kinerja pengurus PPP dan mengetahui laporan perkembangan (progress report) dan aspirasi yang muncul di tingkat konstituen.

“Contoh nyata dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan DPW PPP Jateng terhadap jajaran pengurus dibawahnya itu misalnya melakukan supervisi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh DPC. Selain itu, rapat koordinasi itu berguna untuk mengetahui kondisi internal partai. Contohnya, jika ada persoalan di tingkat DPC seperti proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota legislative, namun tanpa melakukan konsultasi dahulu ke DPW PPP Jateng. Maka, pada saat rapat, pihak DPW PPP Jateng akan langsung menegur dan meminta klarifikasi dari DPC bersangkutan. Sebab, yang berhak melakukan PAW itu kan DPW bukan DPC. Jadi itu salah satu contoh monitor langsung per kasus sesuai dengan kewenangan yang ada di AD/ART,” (wawancara, Farid 7 April 2023)

B. Keuangan DPW PPP Jawa Tengah

Sesuai dengan Pasal 79 AD/ART PPP yang mengatur tentang Keuangan Partai maka sumber dan harta kekayaan Partai diperoleh dari : uang pangkal dan iuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat, serta pendapatan lain yang sah. Pengelolaan harta kekayaan partai diutamakan guna pencapaian tujuan Partai. Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggungjawabkan secara berkala di dalam Rakernas. Sementara pengelolaan semua harta kekayaan Partai di semua tingkatan dilakukan oleh kepengurusan Partai di tingkat masing-masing.

Menyangkut sumber pembiayaan kehidupan berpartai, DPW PPP Jawa Tengah selama ini tidak pernah membebani anggota partai dengan pungutan iuran apapun. DPW PPP Jawa Tengah selama ini mengandalkan sumber pembiayaan partai dari ranah eksekutif dan kursi yang dimiliki di legislatif. Selain itu, sumber pendanaan partai berasal dari sumbangan yang tidak bersifat mengikat dari pihak

lain, baik itu simpatisan ataupun pihak-pihak yang berempati dengan perjuangan PPP.

“Iuran tetap tidak diberlakukan kepada seluruh anggota partai dengan arti kewajiban, hanya untuk sekedar yang ingin membantu saja sifatnya dan tidak ada keterkaitan atau kepentingan apapun, tanggung jawab mengenai sumber dana partai untuk operasional dan sebagainya ditanggung oleh kader-kader PPP seluruh Jateng siapapun ditingkat apapun terlebih yang menduduki Legislatif maupun Eksekutif itu ada nilainya.” (wawancara Farid, 7 April 2023).

DPW PPP tidak menarik iuran organisasi kepada anggotanya sebagai sumber pembiayaan berpartai karena hal itu sangat sulit dilakukan oleh partai. Hal ini juga diungkapkan oleh Farid yang menyatakan bahwa pendanaan partai di tingkat bawah biasanya dilakukan secara gotong royong dengan pengumpulan dana dari pribadi kader sendiri untuk mendukung PPP. Hal ini dilakukan karena dana iuran wajib yang berasal dari anggota partai ada yang berjalan dan ada yang tidak. Namun, kebanyakan iuran anggota memang tidak banyak yang berjalan.

GAMBAR 4.1 RAPIMWIL DPW PPP JAWA TENGAH



Sumber: Dokumentasi DPW PPP Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepartaian, maka dibentuk struktur organisasi dan jenjang kepengurusan PPP sesuai dengan hierarkhinya, Struktur Organisasi Kepemimpinan PPP terdiri atas, organisasi tingkat nasional dipimpin

oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP, Organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PAC PPP, Organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR PPP, organisasi tingkat negara atau gabungan negara di luar Indonesia berkedudukan di wilayah negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPLN PPP.

Susunan hierarki yang sama juga berlaku dalam mekanisme rapat di PPP, sesuai dengan AD/ART PPP, mekanisme rapat di PPP juga tersusun secara hierarkhis dengan urutan Jenis-jenis Musyawarah, adalah: Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Nasional Ulama, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Kerja Anak Cabang, Musyawarah Ranting; Musyawarah Luar Negeri, dan Musyawarah Kerja Luar Negeri Kemudian musyawarah dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan, adalah, Muktamar Luar Biasa, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa.

C. Badan Otonom DPW PPP Jawa Tengah

PPP mempunyai sebuah organisasi sayap yang disebut dalam AD/ART sebagai Badan Otonom. Pembentukan Badan Otonom ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP. Yang kemudian menjadi persoalan, pengurus harian DPP yang dimaksud dalam AD/ART PPP tidak disebutkan yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memberikan kewajiban bagi Partai Politik untuk mendaftarkan Sayap Politiknya kedalam struktur kepengurusan yang dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya

mewajibkan pendaftaran AD/ART dan Susunan Kepengurusan, sementara itu untuk Mahkamah Partai hanya juga wajib dilaporkan tanpa ada kewajiban untuk didaftarkan.

Pada tahun 2014, ketika PPP sedang terjadi konflik internal beberapa sayap partai politik pada akhirnya juga ikut terpecah dan mengambil sikap yang berbeda dengan kepengurusan yang legitimate di depan hukum. Merujuk pada jejak digital yang terjadi sejak PPP mengalami konflik internal, artikel ini mencoba melihat bagaimana organisasi ini bersikap. Badan Otonom PPP terbagi antara lain sebagai berikut.

Tabel 4.1 Badan Otonom PPP Jawa Tengah

No.	Nama	Singkatan	Ketua
1.	Wanita Persatuan Pembangunan	WPP	Hj. Zumrotussa'adah, S.Sos. I
2.	Gerakan Pemuda Ka'bah	GPK	H. Haizul Ma'arif, SH
3.	Generasi Muda Pembangunan Indonesia	GMPI	I. Nurul Furqon, SE, MM
4.	Angkatan Muda Ka'bah	AMK	M. Ngainirrichardl SHI, MM

Sumber: AD/ART PPP BAB X PASAL 77

1. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan badan otonom perempuan satu-satunya yang berada di Partai Persatuan Pembangunan berperan sebagai sayap kanan perjuangan partai. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1988. Sebagaimana Partai Persatuan Pembangunan, azas Islam juga sebagai dasarnya. Wanita Persatuan Pembangunan dibentuk untuk meningkatkan kualitas perempuan secara umum dan partisipasi kader perempuan PPP didunia politik secara khususnya. Lebih-lebih mencetak kader perempuan yang siap memimpin di masa depan yang diadakan oleh Wanita Persatuan Pembangunan untuk mempersiapkan perempuan-perempuan yang berkualitas, seperti: pelatihan Training of Trainers (TOT);

Pelatihan kewirausahaan; Pengajian; Bakti sosial dan membantu menggalang dana untuk bencana; Pelatihan kaderisasi; Workshop calon legislative perempuan se Indonesia.

Lebih jauh lagi keberadaan Wanita Persatuan Pembangunan ini di maksudkan untuk memberikan ruang khusus bagi perempuan Indonesia untuk berkreasi, berinovasi membangun negeri untuk berkontribusi. Peraturan dan fungsi badan otonom sendiri adalah sebagai organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

2. Generasi Muda Ka'bah (GPK)

Gerakan Pemuda Ka'bah, atau disingkat GPK, adalah organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gerakan tersebut adalah salah satu dari tiga sayap pemuda dari partai tersebut, yang lainnya adalah Angkatan Muda Ka'bah dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Gerakan tersebut giat dipakai oleh pejabat PPP penjaga keamanan tak resmi untuk mereka dan keluarga mereka.

Gerakan Pemuda Ka'bah ini di deklarasikan pada tanggal 29 Maret 1982 di Jakarta dan kemudian di kukuhkan kembali pada 1 Muharram 1420 H untuk jangka waktu yang tidak terbatas bertepatan dengan 17 April 1999 M dengan di dasari akan peran dan tanggung jawab yang besar terhadap eksistensi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

GPK Adalah presentasi perjuangan yang gigih dari para eksponen generasi muda, kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membangun potensi sumber daya generasi muda islam agar dapat menjadi manusia yang berilmu, cerdas, unggul, demokratis beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Melalui Gerakan Pemuda Ka'bah.

Negara kesatuan republik Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial, maka sebagai organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ka'bah ini mengambil bagian untuk serta berorientasi, bergerak bersama-sama mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia.

Maka Gerakan Pemuda Ka'bah memiliki tujuan mengarahkan setiap potensi sumber daya manusia generasi muda islam bangsa Indonesia, untuk menjadi insan yang berilm, cerdas, unggul, demokratis, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta termotivasi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, negara proklamasi 17 Agustus 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

3. Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI)

GMPI berstatus organisasi kemasyarakatan pemuda yang merupakan sayap pemuda dari Partai Persatuan Pembangunan, GMPI atau Generasi Pembangunan Indonesia ini dibentuk oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Oktober 1993 silam.

Tujuan dibentuknya GMPI adalah membina dan mengembangkan generasi Muda Indonesia menjadi generasi pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki semangat persatuan dan kesatuan dan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. GMPI atau Generasi Pembangunan Indonesia ini merupakan satu dari tiga sayap pemuda dari Partai Persatuan Pembangunan, selain GMPI ada juga Gerakan Pemuda Kabah atau GPK dan Angkatan Muda Kabah atau AMK.

Sebagai banom dari Partai Persatuan Pembangunan, GMPI dapat menjadi wadah bagi generasi milenial. Dalam berkarya dan juga mengembangkan potensi mereka, selanjutnya GMPI dapat masuk ke semua ranah kaum milenial, baik kampus, komunitas organisasi kepemudaan di perkotaan. Hingga daerah pedesaan, sehingga GMPI menjadi lebih besar dan berkontribusi bagi Negara. Setiap kader GMPI bertugas menarik simpati dari para kaum milenial pada pemilu nanti. Baik lewat gerakan sosialisasi maupun organisatoris setiap personal kader, sehingga berdampak electoral pada partai.

4. Anak Muda Ka'bah (AMK)

Angkatan Muda Ka'bah yang selanjutnya disebut (AMK) adalah Organisasi atau badan otonom yang berada dibawah naungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimasing-masing tingkatan kepengurusan PPP mulai dari Pusat Wilayah hingga tingkatan Cabang.

Angkatan Muda Ka'bah ini di dirikan di Jakarta tanggal 30 Nopember 1998 M bertepatan dengan 11 Sya'ban 1419 H dengan alamat Pusat Jl. Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat 10810. Tujuan di dirikan Angkatan Muda Ka'bah (AMK) ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang siap mengemban dan melaksanakan kebijakan PPP dalam rangka memperkokoh eksistensi dan keberlangsungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Terkait dengan banom, pengurus Harian DPP dapat mengambil inisiatif pembentukan Badan Otonom sesuai dengan kebutuhan. Badan Otonom ditingkat pusa ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Pengurus Harian DPP. Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Badan Otonom masing-masing dengan mendapat rekomendasi dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Badan Otonom di tingkat anak cabang dan ranting disahkan berdasarkan peraturan Badan Otonom masing-masing dengan mendapat rekomendasi Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang, Ketua Anak Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi utusan jenis-jenis permusyawaratan sesuai dengan tingkatannya. Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang, Ketua Anak Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Otonom yang terkait dengan masa kepengurusan, program dan forum permusyawaratan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dengan Peraturan Organisasi.

3. Fraksi

Fraksi PPP adalah pengelompokan Anggota Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan dari PPP. Fraksi PPP adalah alat perjuangan PPP di Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan, sebagai pelaksana kebijakan Pengurus Harian menurut tingkatannya. Fraksi PPP tunduk dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya. Fraksi PPP memberikan laporan secara periodik dan berkonsultasi dengan Pengurus Harian menurut tingkatannya. Setiap Anggota

Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari PPP harus bergabung dalam Fraksi PPP. Anggota DPR/DPRD yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi tetap menjadi alat perjuangan PPP dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya. Pimpinan Fraksi PPP ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan PPP sesuai tingkatannya, dengan memperhatikan aspirasi anggota Fraksi PPP.

a. Pemilihan Ketua DPW PPP Jawa Tengah

Partai PPP juga mengalami konflik internal pasca pemilu tahun 2014. Konflik ini bermula ketika dukungan Partai PPP ke pasangan Prabowo-Hatta pada pemilihan presiden tahun 2015. Dukungan ini disinyalir tidak bulat di dalam kubu Partai PPP itu sendiri, terutama terlihat dengan polemik kehadiran ketua umum Suryadharma Ali di kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno 23 Maret 2014.

Kehadiran Suryadharma Ali mengundang reaksi dari kalangan kader, sehingga sejumlah DPW Partai PPP mendesak diadakannya rapat pleno untuk meminta pertanggungjawaban ketua umum Partai PPP Suryadharma Ali. Hal itu membuat Partai PPP gagal memenuhi target suara pada pemilu 2014. Namun, konflik ini sementara mereda ketika partai PPP bulat mendukung Prabowo-Hatta di pemilu presiden, meskipun diwarnai dengan kebijakan rotasi pimpinan partai, terutama posisi M. Romahurmuziy yang semula sekretaris jenderal menjadi ketua DPP PPP.

Romahurmuziy sendiri tidak mengakui hasil rapat harian tersebut karena dianggap illegal AD/ART Partai PPP. Romahurmuziy pun melawan dengan mengajukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Suryadharma Ali. Puncaknya pasca pemilihan presiden, Partai PPP berujung pada dualisme kepemimpinan dengan digelarnya dua mukhtamar, yakni Mukhtamar Surabaya yang memilih secara aklamasi M. Romahurmuziy sebagai ketua umum. Sementara di pihak Suryadharma Ali, menggelar mukhtamar di Jakarta dengan secara aklamasi juga menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Puncaknya pada pasca pemilihan presiden, PPP berujung pada dualisme kepemimpinan dengan digelarnya dua muktamar, yakni muktamar Surabaya yang memilih secara aklamasi M. Romahurmuziy sebagai ketua umum. Sementara di pihak Suryadharma Ali menggelar Muktamar di Jakarta dan secara aklamasi juga

menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum. Pada 28 Oktober 2014, Menkumham menetapkan kepengurusan PPP versi M. Romahurmuziy melalui keputusan Menhuk dan HAM No. M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai Persatuan Pembangunan. Keputusan ini digugat oleh PPP kubu Djan Faridz.

Setelah kejadian di DPP tersebut, maka berbuntut pada kasus DPW Jawa Tengah yang tidak bisa dihindarkan, Pada Muswil (Musyawarah Wilayah) ke 6 tahun 2016 di Semarang DPW PPP Jawa Tengah melakukan Aklamasi menjadikan Masruhan sebagai ketua DPW terpilih karena dianggap tidak ada lawan yang sesuai syarat AD/ART partai dan menghindari perpecahan yang saat itu terjadi pada pengurus pusat.

“Banyak dinamika persoalan dari dua kubu itu yang ingin saling memperebutkan kekuasaan sebagai ketua hingga pecah dua belah pihak yang membuat situasi kacau, hingga pada saat itu dua orang itu dipanggil DPP dan dinyatakan Aklamasi Pak Masruhan sebagai ketua DPW dan Suyono sebagai Sekwilnya, maka disetujui oleh seluruh pihak maka muswil tetap lanjut” (wawancara, Farid 7 April 2023)

Aklamasi menjadi cerminan bahwa otoriterian masih menjadi karakter didalam jiwa partai tua dan sebesar PPP. Aklamasi dikatakan otoriterian sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Adanya unsur kebebasan dalam menentukan pilihan bentuk dari tidak adanya tekanan atau paksaan atas kehendak dan keinginan pihak tertentu. Dengan kata lain bahwa anggota partai memiliki hak yang sama untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua umum di partainya. Sehingga partisipasi kader partai akan terlihat dengan adanya pemilihan yang bersifat voting.

Gambar 4.2 Musyawarah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah



Sumber: Dokumentasi DPW PPP Jawa Tengah Masruhan dalam Muswil PPP

Indikator demokratis itu terlihat dari partisipatif kader partai dalam menentukan ketua umum partainya. Mayo (1962) dalam Budiardjo (2008) (menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni : Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a change society) Penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku; Menjamin tegaknya keadilan sesuai dengan ungkapan latin yang berbunyi “*ius qui dius tum*” yang menunjukkan eratnya hubungan hukum dan moral.

b. Peraturan Tata Cara Pemilihan Ketua DPW PPP Jawa Tengah

Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu organisasi dan kekuatan politik, perlu melakukan konsolidasi guna menata sistem dan struktur organisasi lebih mantap, kuat dan bermartabat. Bahwa, Muktamar IX Partai Persatuan

Pembangunan merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi untuk menetapkan berbagai keputusan partai, untuk terlaksananya Mukhtar secara tertib dan terkendali, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua DPW dan Formatur Musyawarah Wilayah, maka untuk itu dipandang perlu menetapkannya dalam suatu keputusan, Anggaran Dasar hasil Mukhtar VII Partai Persatuan Pembangunan pasal 57 ayat (3), dengan memperhatikan pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna VI Mukhtar IX Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Persatuan Pembangunan memiliki aturan sendiri yang telah dijalankan selama beridinya partai salah satunya peraturan dan persyaratan dalam pemilihan ketua umum, ketua dpw, ketua dpc. Maka dalam aturan pemilihan ketua DPW ini adalah sebagai berikut, pemilihan Ketua DPW/Ketua Formatur dan Pemilihan Anggota Formatur Musyawarah Wilayah dilaksanakan dalam Sidang Paripurna VII, pemilihan Ketua DPW/Ketua Formatur dan pemilihan Anggota Formatur Musyawarah Wilayah dilaksanakan secara demokratis, pemilihan Ketua DPW/Ketua Formatur dan Pemilihan Anggota Formatur Mukhtar dilaksanakan secara serentak pada waktu yang bersamaan di 10 (sepuluh) zona waktu yang telah ditetapkan, Tata Tertib Musyawarah Wilayah dengan kertas suara yang berbeda, waktu sebagaimana dimaksud adalah Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut WITA, waktu pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur sebagaimana dimaksud mengikuti waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Kemudian juga Adapun tata tertib yang harus dijalankan ataupun ditaati selama prosesi berlangsung sebagai berikut, Pemilihan Ketua DPW/Ketua Formatur dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka pemilihan Ketua DPW/Ketua Formatur dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Calon Ketua DPW/Ketua Formatur yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Ketua DPW/Ketua Formatur Terpilih. Dalam hal ketentuan tidak terpenuhi maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon Ketua Umum/Ketua Formatur yang memperoleh suara terbanyak sama.

Tercantum syarat menjadi ketua DPW sebagai berikut, Bakal Calon Ketua DPW/Ketua Formatur wajib mendaftarkan diri kepada pimpinan sidang di Makassar sebelum dilakukan pemilihan. Bakal Calon Ketua DPW/Ketua Formatur wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal (6) ART PPP yaitu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhaanahu Wata'ala serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP, telah menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota, tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pernah menjadi Pengurus Harian DPW, dan/atau Ketua DPC PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh terhitung sejak diangkat dalam Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah/Cabang berikutnya fasih dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Pimpinan sidang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud, kemudian pimpinan Sidang mengumumkan nama-nama Bakal Calon Ketua DPW/Ketua Formatur yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Ketua DPW/Ketua Formatur yang memenuhi syarat sebagaimana, maka calon Ketua Umum tersebut langsung dinyatakan sebagai Ketua DPW/Ketua Formatur terpilih. Bakal calon Ketua DPW/Ketua Formatur wajib menyampaikan visi dan misi sebagai calon Ketua Umum dan menyampaikan kesediaan untuk dipilih menjadi Ketua DPW/Ketua Formatur dihadapan peserta Musyawarah Wilayah.

Kemudian, dengan AD/ART Pasal 7 Keabsahan suara dipertimbangkan sebagai berikut, Suara dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan dengan nama calon Ketua Umum/Ketua Formatur ditulis dengan benar dan jelas dalam kertas suara yang disediakan oleh panitia b. Peserta utusan wajib menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua Umum/Ketua Formatur, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka kertas suara dinyatakan tidak sah, apabila terdapat kertas suara calon Anggota Formatur yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam maka dinyatakan tidak sah. Setelah perhitungan tersebut maka menyatakan suara terbanyak sebagai pemenang.

2. Penentu Keputusan dalam Partai

Derajat kesisteman suatu partai politik dapat dinilai dari tokoh penentu di internal partai. Yakni apakah seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan.

Sesuai AD/ART Partai, maka penentu keputusan politik partai disesuaikan dengan jenjang hierarkhis organisasi. Dalam konteks ini jenjang mekanisme dan kewenangan DPW Partai dijalankan sesuai dengan yang termaktub pada BAB VII pasal 25 AD/ART PPP Terkait Kuorum dan tata Cara Pengambilan Keputusan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pengambilan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Penentuan keputusan dalam partai, mengacu pada AD/ART partai dapat mengadakan rapat musyawarah sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama karena dalam mencapai mufakat ini setiap pengurus mempunyai suara yang sama. Apabila penentuan keputusan ini dirasa sangat penting, maka ada kewajiban tiap structural untuk datang menghadiri karena rapat ini adalah sebagai forum tertinggi dalam partai, maka pengambilan keputusan hanya dapat dilaksanakan dalam sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Utusan yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Namun, jika rapat itu tidak menentukan hal-hal yang sifatnya krusial dan hanya memutuskan persoalan yang bersifat administratif, maka keputusan dapat diambil tanpa harus memenuhi quorum.

“Setiap pengurus mempunyai hak yang sama tanpa membedakan posisi dan jabatan, jika tidak memenuhi quorum kita diperbolehkan menunggu dan itu sebagai waktu istirahat yang tak terduga artinya waktu tambahan lagi yang mungkin bisa mengulur waktu muktamar/muswil selama 2x10 menit, Struktural PPP selalu berupaya melakukan pro-aktif dengan memberikan kesempatan tiap pengurus menghadiri rapat dan memberikan kritik saran dan sebagainya, karena jika dirasa hal yang ada dalam rapat menyangkut keberlangsungan partai kedepan.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Ada beberapa keputusan yang dalam penentuannya harus dikonsultasikan ke pihak DPP PPP sebagai induk organisasi. Keputusan yang memerlukan konsultasi itu yakni keputusan politik yang memiliki nilai strategis bagi partai, seperti penentuan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota serta penentuan caleg. seluruh mekanisme politik yang berlangsung di daerah dan memiliki nilai strategis itu wajib dikonsultasikan kepada pihak DPP PPP atau Ketua Umum PPP. Terhadap hal ini, DPW PPP Jateng patuh dan tunduk pada petunjuk yang dikeluarkan oleh DPP PPP. Sepanjang keputusan itu menyangkut arah ke depan partai, baik itu partai diuntungkan atau dirugikan dalam kaitan dengan kebijakan tersebut, maka DPW PPP Jawa Tengah tidak akan berani melangkah tanpa melakukan konsultasi dengan induk organisasi. Karena induk organisasi merupakan muara seluruh keputusan menyangkut keberlangsungan partai ke depan.

Sepanjang keputusan tersebut menyangkut arah ke depan partai, baik itu partai diuntungkan atau dirugikan dalam kaitan dengan kebijakan tersebut, maka DPW PPP Jateng tidak akan berani melangkah tanpa melakukan konsultasi dengan induk organisasi. Karena induk organisasi merupakan pengarah dari seluruh keputusan menyangkut keberlangsungan partai ke depan agar sejalan tanpa perpecahan. Keputusan yang bersifat strategis dan berdinamika dalam partai untuk jangka waktu dan mempunyai pengaruh baik maupun buruk bagi DPW PPP Jawa Tengah maka wajib berkoordinasi dengan DPP PPP terlebih dahulu dan menunggu arahan atau perintah keluar terlebih dahulu sebelum berjalan, karena apabila tidak akan memunculkan faksi dan menjadikan partai di dalam partai.

“Kita di provinsi berusaha agar terus seperti itu, kelompok tertentu atau yang lain mau berbeda yaitu terserah, silahkan saja. Tapi kita berusaha sejalan dengan DPP PPP, meminimalisir perpecahan dalam internal walaupun ada didaerah provinsi lain yang tidak sejalan ataupun di kubu DPP sendiri ada pemberontakan setidaknya kita DPW PPP Jawa Tengah tidak menambahi permasalahan itu, sudah banyak dan sering di PPP pecah belah antar tokoh elit, ingin saling menggulingkan.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Selama ini, Posisi DPW PPP Jateng dengan segala rekomendasi gagasan yang di bawakan kepada DPP PPP untuk dipertimbangkan dan diberi perintah selalu sejalan dan sesuai keinginan karena tentunya pengurus DPW PPP Jawa

tengah selalu melihat kondisi dan telah mempertimbangkan bersama untuk suksesi partai, dan tentunya pengurus daerah yang lebih tau kondisi di daerahnya sendiri seperti apa. DPW PPP Jawa tengah sebagai pengurus dibawah DPP PPP satu tingkat secara struktural memang harus mengikuti, karena selain itu, DPP PPP telah memberikan kontribusi dan peran yang besar dalam setiap keputusan maupun permasalahan yang ada di daerah, campur tangan dan perlibatan bantuan DPP PPP memberikan pengaruh dan meringankan.

D. Derajat Identitas Nilai

Derajat identitas suatu partai politik dapat dilihat dari basis sosial pendukungnya. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu (Romli, 2021). Identitas nilai diukur dengan indikator, *Pertama*, Hubungan PPP dengan kelompok populis tertentu. *Kedua*, Pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan pemberian berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). *Ketiga*, Proses rekrutmen politik *Keempat*, Pertanggungjawaban Kinerja PPP ke Publik

Vicky (2003) menjelaskan Identitas partai dilandasi oleh ideologi dan platform partai politik, yang berkaitan dengan basis sosial pendukungnya dan identifikasi kader terhadap pola dan arah perjuangan. Identitas nilai tidak hanya terlihat pada pola arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlihat juga pada basis sosial pendukung.

Ideologi yang merupakan sistem nilai dan norma, tentu masih bersifat abstrak. Perlu ada penjabarannya lebih lanjut. Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi atau nilai, yang bersifat abstrak itu, yang dianut oleh suatu partai politik (Vicky, 2002).

1. Hubungan PPP dengan kelompok populis tertentu

Derajat identitas nilai suatu partai politik terlihat dengan hubungan yang dibangun dengan kelompok populis tertentu. Sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 13 AD/ART PPP, maka PPP Jateng juga membina hubungan dan membangun kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi yang berbentuk lembaga, yayasan, paguyuban, dan lain-lain yang searas dan atau seaspirasi dengan Partai. Wujud hubungan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Fungsional, dan Organisasi Profesi Partai dilakukan melalui Musyawarah secara umum.

PPP sebagai sebuah partai yang telah lama berkiprah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. PPP tentunya memiliki organisasi-organisasi yang cukup banyak sebagai basis dukungan partai. Selain itu juga. PPP merupakan salah satu partai yang berasaskan Islam, tentunya sudah jelas bahwa basis dukungan PPP adalah mayoritas masyarakat Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Dalam rangka mendorong kaderisasi itu pula, maka DPP PPP juga memberikan dukungan kegiatan bagi organisasi sayap dan badan otonom. Bidang Kesra DPP PPP dan PP WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) tercatat mengadakan rapat kordinasi bidang perempuan pada tahun 2019 dan sejak saat itu ghiroh sayap perempuan PPP khususnya yang tergabung dalam WPP di berbagai tingkatan DPW dan DPC juga lebih aktif, meski pada tingkat pusat sendiri PP WPP masih minimal intensitas kegiatannya.

Selain kaum perempuan, maka dalam persiapan Pemilu 2019 DPP PPP juga mendorong sayap kepemudaan dalam lingkungan PPP untuk bisa aktif kembali dan menjadi basis meningkatkan kader muda PPP menghadapi pemilu tersebut. Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) menjadi sayap yang pertama melakukan konsolidasi organisasi kepemudaan di lingkungan PPP, dimulai dengan penyegaran kepengurusan di tingkat pusat dan kemudian membenahi kepengurusan diberbagai wilayah dan juga cabang-cabang dengan kordinasi yang cukup baik dengan DPW PPP dan DPC di masing-masing daerah. Langkah GPK ini kemudian diikuti oleh Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) yang juga melakukan revitalisasi kegiatan antara lain dengan merekrut kalangan milenial yang kedepan diharapkan akan mejadi kader-kader milenial PPP. Maka Angkatan

Muda Ka'bah (AMK) juga berkomitmen melakukan pembenahan organisasi yang telah dimulai sejak dua bulan sebelum Muktamar dengan menata kepengurusan di sejumlah wilayah.

“Pada waktu itu, partai memerlukan pencitraan ulang, dari dampak buruk dinamika politik apapun itu agar kemudian masyarakat bisa melihat kinerja PPP dari sisi kebermanfaatannya. Untuk itu, dengan memanfaatkan kuatnya jaringan massa yang ada, kita tunjukkan kinerja partai menuju ke arah yang lebih baik. Dengan strategi menjadikan seluruh kader terutama para anggota legislatif maupun tokoh ternama agar selalu memberikan edukasi dan terjun secara langsung sehingga dekat dengan masyarakat, keberadaan lembaga legislatif partai harus mampu menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat” (wawancara, Ngainirrichard, 12 April 2023)

Hubungan yang dijalin itu telah di dasarkan dengan tujuan yang sama dengan satu visi dan misi, yaitu seperti tagline partai PPP ini sebagai rumah besar umat islam artinya yang mampu menampung seluruh elemen umat islam yang ada di sekitar. Termasuk atas bantuan Badan Otonom, dimulai dari hubungan yang terbangun itu akan bisa berjalan jika dilandasi dengan penuh keyakinan untuk kesejateraan dan kemakmuran bersama, pun dengan Badan Otonom artinya PPP juga memberikan ruang untuk siapapun untuk belajar kepartaian dan juga mempersiapkan generasi penerus.

“Apabila ada perbedaan pendapat itu bukan untuk selisih tapi dalam rangka mengaktifkan sistem permusyawaratan yang ada, itu baik. Yang intinya tetap pada garis yang sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama” (Ngainirrichard, 1 April 2023)

Sedangkan, partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional dan organisasi profesi yang searas dan seaspirasi dapat menempatkan kader Partai dalam organisasi dimaksud. Keberadaan organisasi ini tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Namun, ormasormas yang memiliki kedekatan emosional ke PPP seringkali memberikan dukungan politisnya ke PPP. Bahkan, tak jarang kader-kader dari ormas-ormas tersebut aktif di PPP sesudah merasa cukup berkiprah di lingkup organisasinya. Artinya, ormas yang memiliki afiliasi dengan PPP pada akhirnya banyak menyumbang kader-kader potensial yang akan meneruskan kinerja partai.

“Seperti contoh Mas Richard sendiri itu sebagai salah satu kader terbaik PPP Jawa Tengah, beliau Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah yang juga menjadi ketua dari salah satu organisasi badan sayap yang ada di PPP dan sekaligus menjadi Ketua PC IKA PMII Kota Semarang. Memang sudah seharusnya Kader-kader PPP untuk masuk berada di lingkungan organisasi luar maupun sebaliknya tidak menutup pintu untuk anggota organisasi luar masuk ke dalam PPP” Farid, 7 April 2023)

Meski demikian organisasi yang memiliki hubungan dengan PPP tersebut tidak memiliki hak suara ataupun mengintervensi keputusan politik sedikitpun di dalam internal, menurut Farid, tokoh-tokoh ormas yang pada umumnya para senior PPP tersebut seringkali memberikan arahan sumbangsir saran di saat internal partai mengalami permasalahan yang bercabang.

2. Pengaruh Klientesme Dalam Organisasi

Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat. Sebagai pendukung loyal karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai, tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu (Romli, 2021).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang mampu membawakan suara yang cukup baik bagi PPP, bagaimana dinamika PPP terlebih yang menjadikan kadernya menjadi Wakil Gubernur Taj Yasin, terlebih di kabupaten banyak bupati/wakil bupati yang diusung oleh PPP. Kuatnya basis dukungan pendukung PPP ini hasil dari konsolidasi bersama.

“Hal itu senada dikemukakan Wakil Ketua Bid. Sosial DPW PPP Jawa Tengah, Afif Effendy. Menurutnya, PPP Jateng masih tetap optimis memiliki massa loyal hampir di seluruh wilayah Jateng. Sebab, Jateng merupakan basis Islam dan santri Mbah Moen. Hal ini juga didukung oleh massa loyalis PPP yang memegang semboyan “Pejah Gesang Nderek Mbah Moen” dan “Rumah Besar Umat Islam”.”

Dari database yang dimiliki kantor sekretariat DPW PPP Jawa Tengah, hingga kini PPP Jateng memiliki anggota sebanyak 1.110.000. Jumlah ini sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh DPW PPP Jawa Tengah Jateng per November 2022. Menurutnya, jumlah itu jauh meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2004. Dalam pemilu 2004, kader PPP Jateng yang memiliki KTA

hanya berjumlah sebanyak 700.000 orang. Afif mengklaim, jumlah anggota PPP yang terdaftar itu hanya sebagian kecil dari pendukung PPP. Sebab, banyak pendukung serta simpatisan PPP Jateng yang jumlahnya mencapai jutaan pendukung belum memiliki KTA.

“Ya, memang. Pendukung PPP itu sebenarnya banyak, massanya ada, cuma karena terkadang SDM kita yang tidak mampu dan pengurusnya yang kurang dan semakin kurang, apalagi sesepuh dan ulamanya PPP semakin berkurang dan sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan politik maka kita juga semakin kewalahan, apalagi banyak partai dan cara-cara berpolitik yang baru sekarang, kita yang sebetulnya partai tua dan harusnya matang malah semakin ketertinggalan, ya kebanyakan kita mengandalkan “santri mbah mun”, gitu.” (wawancara. Afif, 17 April 2023)

Keyakinan bahwa PPP di Jawa Tengah masih menjadi salah satu partai yang dipertimbangkan untuk dipercaya dan dipilih yang akan terus eksis bagaimanapun dinamika politik yang terjadi. PPP tetap bergerak secara yakin akan selalu mempunyai suara dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang menyumbang pemenuhan threshold meski suara diambang batas.

“Ya itu, karena PPP banyak basis masa yang setia dan loyal. PPP banyak masalah pun tetap tidak akan pergi dan terus mempercayakan PPP, karena memang dulunya adalah kader garis keras PPP dan santrinya mbah moen itu, jadi seringkali pengurus PPP tak mengkhawatirkan” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Alasan dari para kader PPP yang masih bertahan meski PPP semakin terpuruk yang *pertama*, memang dari slogan diatas, dan memang jiwanya loyalis, kemudian Rumah Besar Umat Islam yang dimaksud ini adalah mewadahi seluruh aspirasi umat Islam. Namun, fakta dilapangan PPP belum bisa memenuhi seluruh aspirasi umat Islam, hanya umat NU yang paling gencar, kemudian *kedua* baru Muhammadiyah, sekalipun aspirasi kepada dua ormas itu juga belum bisa sepenuhnya terpenuhi dikarenakan kekuatan PPP belum begitu kuat dan salah satu alasannya PPP memang masih didominasi oleh kedua ormas tersebut.

3. Proses Rekrutmen Politik

Proses rekrutmen di partai politik dilakukan untuk mendapat dukungan dan menjamin regenerasi kepemimpinan di tubuh parpol. Sebagai partai yang terbuka,

PPP tidak melakukan seleksi ketat bagi siapapun yang ingin masuk menjadi anggota partai. Dalam ini siapapun yang ingin menjadi kader partai hanya dipersyaratkan untuk memenuhi prasyarat keanggotaan sesuai dengan Bab II bagian Pertama Pasal 3 AD/ART Mukhtamar VII PPP tentang Persyaratan.

Pasal yang disebutkan bahwa anggota Partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota. Syarat untuk menjadi anggota Partai adalah: WNI yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Program Perjuangan PPP, Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP, mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi. Disamping itu, calon anggota harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan menyampaikannya kepada pengurus partai yang berwenang.

Sebelum menjadi anggota, calon anggota harus bersedia mengikuti 3 kegiatan tahapan yang diadakan oleh pengurus partai, tahap awal, tengah, dan akhir (*finish*), itu merupakan bentuk pembekalan, pembinaan dan pengkaderan dari pengurus PPP. Sebelum masa pelantikan anggota diwajibkan mengucapkan ikrar atau janji suci sebagai anggota yang diatur dalam peraturan serta terikat dalam AD/ART, Pengesahan seseorang menjadi anggota dilakukan oleh DPP.

“DPW mampu dan berhak atas segala keputusan. Sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, maka oleh beberapa pertimbangan juga seseorang bisa ditolak dan diterima menjadi anggota partai dan diputuskan dalam rapat dpw partai” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Setelah diterima menjadi anggota partai, maka kader yang baru tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kader lanjut sesuai tingkatannya. Materi kaderisasi difokuskan pada penanaman ideologi dan platform perjuangan PPP dan pengetahuan politik yang disesuaikan dengan tingkatan kader. Selain itu, juga ditanamkan materi lain seperti pertanian, perekonomian, atau usaha kecil.

Jenjang pendidikan dan pelatihan bagi kader ini dilakukan secara bertingkat dan berlanjut: Di tingkat pusat/nasional dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus), yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Utama/Nasional; di tingkat daerah/provinsi dibentuk Badan Pendidikan dan

Pelatihan Daerah (Badiklatda), yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Madya; Di tingkat cabang/kota/kabupaten dibentuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Badiklatcab), yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Pratama; Di tingkat anak cabang/kecamatan dibentuk Panitia Pelaksana Kursus Kader Anak Cabang, yang bertugas melaksanakan Kursus Kader Partai Tingkat Pemula Anak Cabang/Lanjutan; Di tingkat ranting/desa/kelurahan dibentuk Panitia Pelaksana Kursus Kader Ranting.

Sistem rekrutmen anggota dan pengurus partai yang terkesan tidak didasarkan pada kompetensi ideologi, menyebabkan komitmen kader terhadap partai masih rendah. Artinya bahwa kader-kader yang bergabung dalam partai bukan karena kesamaan ideologi serta adanya harapan kesamaan platform dengan partai. Beberapa dari mereka yang bergabung menjadi anggota hanya didasarkan karena adanya hubungan kekerabatan atau pertemanan dengan salah seorang elit partai.

“Saya, juga termasuk rekan-rekan saya, pada saat awal-awal saya masuk di PPP, itu saya masuk karena keluarga punya darah dan ikatan PPP, lalu saya bertemu dengan teman-teman di PPP juga rata-rata hamper sama, pun ada juga yang memang dari kalangan aktivis kemudian terjun di PPP karena persamaan ideologi atau bahkan hasil rekrutmen pengurus partai tapi saya rasa masih jaranh karena rekrutmen tentu nya masih pasif, pada saat itu, itulah dinamikanya.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh klientisme dalam partai masih tinggi dan rekrutmen belum berjalan dengan baik sesuai dengan Teori Vicky dan Randall, dimana beberapa anggota yang bergabung tidak didasarkan karena kesamaan ideologi maupun platform dari partai, tetapi cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai). Rendahnya kesadaran para kader maupun anggota partai dalam melaksanakan amanah partai yang didasarkan atas ideologi dan platform partai, berdasar dari temuan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya karena ketidakmampuan partai itu sendiri untuk menanamkan nilai-nilai dasar partai. aMulai dari proses rekrutmen anggota, pola kaderisasi, sampai kepada menjaga hubungan dengan organisasi internal maupun eksternal yang ada.

4. Pertanggungjawaban Kinerja PPP ke Publik

Sebagai salah satu partai yang berkiprah sejak lama dan menjadi pemenang Pemilu dari masa pra-reformasi dalam kancah nasional, Menurut Afif, bahwa pertanggungjawaban kinerja PPP di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jateng kepada publik memang tidak ada. Namun, kinerja DPW PPP selalu dipertanggungjawabkan kepada seluruh jajaran partai pada saat dilakukan Rapat Kerja Wilayah PPP Jateng. Sedangkan pertanggungjawaban kinerja PPP secara nasional selalu dipertanggungjawabkan ke publik dalam bentuk penyampaian laporan kinerja Fraksi PPP di DPR RI melalui media massa.

“Pertanggung jawaban kinerja PPP dalam teropong nasional selalu diperhitungkan agar menjadi tolak ukur kerja dan keterbatasan Fraksi Partai, termasuk mengawal segala kebijakan dan RUU yang melanggar syariat akan terus kami perjuangkan, seperti halnya mengharamkan miras pada waktu saat itu. Itu merupakan bentuk pertanggung jawaban PPP dan bukti jiwa kesatria PPP terhadap public” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Kenyataanya bentuk laporan kinerja tersebut yang ditekankan dalam PPP dalam AD/ART, dalam perjalanannya PPP tidak ditemukan dan belum sesuai melaksanakan sepenuhnya, lemahnya sistem keparaian yang menganggap bentuk seperti itu akan diperbaiki saja kedepannya cukup dibahas dalam rapat kerja wilayah sebagai bentuk evaluasi.

BAB V

DIMENSI EKSTERNAL DESISIONAL OTONOMI DAN REIFICATION

Diskusi dalam bab ini akan membahas. *Pertama*, Dimensi Otonomi, di dalam teori dimensi otonomi dan kesatuan merupakan karakter yang terpisah, namun dalam prakteknya kedua unsur ini sering saling bergantung sama lain. Huntington (1983) menekankan pentingnya partai politik untuk memperkuat pelebagaan partai politik, karena partai politik mengorganisir partisipasi politik, dan memengaruhi batas-batas sampai mana partisipasi tersebut mampu diluaskan. Stabilitas dan kekokohan partai dan sistem tergantung derajat tinggi rendah pelebagaan partai politik. *Kedua*, Reifikasi menunjukkan derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku. DPW PPP Jawa Tengah perlu dilihat sesuai pertimbangan derajat pada teori, bahwa pengetahuan publik tentang partai yang berasaskan islam telah benar-benar tertanam, karena usia yang sudah sangat matang, yakni 50 tahun berkiprah di kancah perpolitikan Indonesia. Tentu saja yang dimaksud individu atau lembaga yang menyesuaikan aspirasi dan harapan adalah orang perorangan yang beragama islam dan lembaga yang sama-sama menginginkan nilai-nilai islam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawan (2015) menjelaskan partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Menurut Afif dan Farid, DPW PPP Jateng selama ini tidak pernah melakukan konsultasi dengan aktor luar partai dalam mengambil keputusan politik. DPW PPP Jateng hanya melakukan konsultasi dengan induk organisasi sebagai pemegang otoritas tertinggi partai.

Selanjutnya otonomi ada substansi yang penulis pantau, dijelaskan Lutfi (2009) kemandirian pengambilan keputusan yang akan dipahami pertama, keuangan partai dan kemandirian pengambilan keputusan. Keduanya sangat

berhubungan dengan aliran dana dari mana dan apakah ada pengaruh pengambilan keputusan didalam. Hal yang terpenting dari dimensi ini adalah: pertama, apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut atau hubungan itu bersifat independen. Kedua, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai.

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Yang menjadi isu utama di sini terutama bukan tentang sikap partai politik mengenai tuntutan masyarakat umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Untuk mengukur derajat pengetahuan publik, penulis menggunakan indikator, a) Partisipasi Partai dalam Politik Elektoral terkait strategi pemilihan umum. b) Partisipasi Partai terhadap masyarakat terkait strategi komunikasi politik.

A. Derajat Otonomi

1. PPP dalam Bersikap Terhadap Pemerintah Daerah

Melihat dari segi hubungan PPP dengan pemerintahan daerah (Provinsi), peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi (Lutfi, 2009).

Secara teori ada keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam masa transisi politik, pemahaman terhadap hubungan antara kedua proses itu menjadi sangat penting. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem politik dan pemerintahan dilakukan secara terpisah. Logika yang digunakan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam realitas, semua elemen tersebut akan digunakan dan menimbulkan kemungkinan komplikasi satu dengan lainnya.

Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah telah memberikan sikap kritis dan menjadi salah-satu poros mengawal segala bentuk kebijakan pemerintah, dengan adanya berbagai macam dinamika politik yang ada di Indonesia keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih dibutuhkan eksistensinya untuk mengontrol isu-isu strategis seperti paham-paham yang sifatnya bertentangan dengan syariat islam di Indonesia atau sebagaimana para ulama mengemukakan. Maka, PPP berpegang teguh dalam menjalankan Amanah masyarakat dan lebih banyak mengadopsi aturan-aturan yang menunjang kebutuhan masyarakat yang notabennanya mayoritas beragama islam. Kemudian melalui pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, tokoh-tokoh nasional, pejabat daerah mereka menyatakan telah sepakat dan menuai bahwa PPP adalah partai yang melestarikan hal tersebut. Karena kebutuhan mereka semua terhadap PPP cukup tinggi, diketahui selama orde baru hingga era reformasi selalu menjadi penengah dan penyeimbang.

“Sikap politik dalam berpartai PPP yang dijalankan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tiap-tiap wilayah, meski seperti itu, PPP tetap berposisi kritis dan terus mengawal segala kebijakan di tiap daerah itu. Terhadap kebijakan gubernur pun juga, walaupun wakilnya dari PPP juga. Sikap kritis ini merupakan upaya kita sebagai partai yang selalu aktif dan berperan terhadap pemerintah demi kebaikan dan sejalan bersama-sama sesuai kehendak rakyat. Dan itulah bentuk PPP menjalankan fungsinya sebagai partai politik, dengan itu kita harap kebijakan yang ingin PPP capai juga tersampaikan dan terealisasikan.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Sejak dulu jika dibenturkan dengan pembahasan dengan pembahasan aturan Perundang-Undangan, Perda, maupun maupun parlemen yang dibahas oleh Dewan Eksekutif maupun Legislatif, PPP merupakan satu-satunya partai yang awalnya berdirinya melalui empat Fusi atau Partai besar yang memiliki akar rumput di negara Indonesia. Partai tersebut meliputi Partai NU, PARMUSI, PERTI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Hal itu kenapa pada waktunya tiap-tiap kebijakan yang dihasilkan PPP.

Dari tindakan seperti itulah maka PPP sejauh ini selalu diberi selalu diberi ruang penuh dalam menyampaikan gagasan yang sifatnya mengarah kepada aturan ataupun kebijakan yang akan diterapkan. Dengan alasan diterimanya sumber gagasan itu dari PPP maka dapat dipastikan mampu membawa dan menaungi

kepentingan partai-partai islam lainnya. Dengan alasan diterimanya PPP dikalangan partai nasioanlis maupun partai islam itu sendiri, maka dengan hal tersebut PPP tetap eksis dan usahanya terus mengawal segala proses untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang ada diparlemen maupun birokrasi pemerintahan.

2. Hubungan PPP dalam Politik dengan Partai Lain

Hubungan partai merupakan landasan dan motivasi pelembagaan fungsi partai politik, dengan kelompok populis tertentu dan hubungan pemimpin dengan pengikut di dalam organisasi. Selain itu, platform berperan sebagai kerangka dasar sebagai kerangka dasar untuk membina derajat otonomi partai terhadap organisasi politik lain. Lebih dari itu terbukanya platform hubungan antar partai saling memberikan gambaran, mengembangkan imajinasi public tentang eksistensi partai dan cita-cita yang hendak diperjuangkan (Ridho, 2023).

Komunikasi antar partai dibutuhkan dan penting untuk menjaga peran dan pembangunan bersama. Memberikan ruang antar partai untuk memngemukakan gagasan idenya dan ideologi dasar partai satu dengan lain sebagai penjelasan tujuan partai, untuk menghambat kepentingan-kepentingan yang bisa menghambat pembangunan. Apalagi partai sebagai instrumen penentu kebijakan maka harus ada kesamaan persepsi dalam memngambil keputusan terkait pembangunan (Ridho, 2023).

DPW PPP Jawa Tengah selalu menjalin hubungan baik dengan partai lain. Hal itu diwujudkan dalam peran serta PPP dalam forum politisi partai. Forum tersebut merupakan salah satu wadah bagi politisi partai yang duduk di lembaga legislatif dalam membahas kondisi politik maupun mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Sedangkan bagi politisi perempuan yang duduk di lembaga legislatif, semuanya tergabung dalam Koalisi Perempuan Politik yang juga merupakan organisasi lintas partai, dalam wadah ini diselenggarakan beberapa macam kegiatan yang bersifat sosial, yakni menjalankan program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan terhadap kader-kader perempuan ini dilakukan dengan melakukan pendidikan politik dan program riil yang berguna bagi menopang ekonomi keluarga. Koalisi Perempuan Politik ini ada di semua tingkatan. Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi

Perempuan Politik ini mendapat dukungan dari APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Koalisi yang di Bangun

Tradisi koalisi partai di pemilihan umum, yang cenderung dibangun mendekati batas akhir pendaftaran calon pemimpin kabupaten, daerah, maupun presiden, kerap kali tidak berdampak pada bangunnan koalisi yang kokoh. Pemilihan umum serentak semestinya menjadi pintu untuk membangun koalisi sejak awal. Modal besar partai politik membangun koalisi dalam pemilihan umum adalah basis perolehan suaranya dan kursinya di DPR. Maka, tidak heran jika kemudian perhelatan pemilihan umum serentak di Indonesia selalu dimuali dari bangunan koalisi yang dirajut mendekati masa-masa akhir pendaftaran calon pemimpin eksekutifnya.

DPW PPP Jawa Tengah dalam membangun koalisi selalu berpegang pada aturan dasar dan *khittah* partai yang mengartikan koalisi yang dibawakan tidak keluar dari garis ketentuan dan kesepakatan dasar partai di dalam AD/ART tujuan, fungsi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Saat ini kita di Jawa Tengah berkoalisi dengan PDI-P yang mengawal Gubernur dengan Wagubnya Gus yasin kader PPP. Tetapi kita juga eksis dalam kritisasi terhadap pemerintahan. Artinya, Ketika kita membangun koalisi kita harus siap menanggung segala resiko. Kita tidak hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi disaat partai yang berkoalisi kemudian ada problem maka bisa jadi memperburuk kita juga karena kita satu tubuh dalam koalisi. Soal pertimbangan mutlak, itu kita serahkan kepada Pusat maka dari pusat melihat rekomendasi dari kita dan memberikan Surat Rekomendasi atau tidak berdasarkan keputusan bersama.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

PPP Jawa Tengah dalam membangun koalisi pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Koalisi dengan partai politik lain juga dijalin PPP dalam hal menentukan posisi –posisi strategis di tingkat legislatif, seperti penyusunan alat kelengkapan DPRD, seperti pimpinan dewan, panitia anggaran, panita musyawarah, panitia legislasi dan majelis pertimbangan. Dalam ini, koalisi itu tidak ada restu yang didapatkan dari Majelis Petimbangan, Ketua umum dan DPP PPP selaku induk organisasi, maka DPW PPP Jateng tidak akan meneruskan langkah koalisi di wilayahnya.

3. Pengaruh luar dalam pengambilan keputusan PPP

Wawan (2015) menjelaskan secara umum terdapat empat factor yang mempengaruhi proses penyusunan kebijakan dan pengambilan sebuah keputusan, antara lain lingkungan, pandangan, penyusunan kebijakan dalam sebuah keadaan tertentu, kemudian segala bentuk pengesahan keputusan dalam anggota partai ataupun masyarakat umum empat faktor tersebut saling terhubung dan pokok utama bahan pertimbangan.

Kompleksitas diukur dari sisi keragaman sub unit organisasi. FRaksi-fraksi yang ada di PPP selama satu periode terakhir terlihat dominan mampu meminimalisasi, dengan cara membangun konsesus bersama. Ini juga berkaitan dengan dimensi kesatuan, yang berhubungan dengan kesatuan visi dan orientasi para kader partai, baik dari struktural pusat, wilayah, daerah maupun desa-desa, termasuk kader akar rumput. Sementara, otonomi diteropong dari perbedaan dan ketergantungan dengan kelompok ataupun individu lain. Fakta tersebut jelas, sebagai partai islam PPP membedakan diri melalui karakter ide-gagasan para kadernya, sehingga kerangka pengkaderan uang berjenjang dan sistematis telah ditekankan lebih massif.

“Berbicara otonomi PPP, sudah lebih tertata sekarangnya ketimbang tahun kita sebelumnya, keputusan di level wilayah dan seluruh yang kita bawahi diberikan kepercayaan dahulu untuk dirinya menata sendiri kemudian perestuan tersebut dari grasroot keatas, seperti halnya DPC ke DPW kemudian ke DPP, untuk mendapatkan surat rekomendasi.” (wawancara Afuf, 17 April 2023)

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dari narasumber tersebut mengartikan otonomi yang terdapat pada PPP Jawa Tengah dalam memberikan arahan keputusan untuk kepengurusan internalnya yang dibawah sepenuhnya dipegang oleh masing-masing dengan kemandirian tanpa adanya intervensi kelompok maupun individu.

B. Derajat Pengetahuan Publik

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Yang menjadi isu utama di sini terutama bukan tentang sikap partai politik mengenai tuntutan masyarakat umumnya, tetapi tentang

corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Untuk mengukur derajat pengetahuan publik, penulis menggunakan indikator, 1) Partisipasi Partai dalam Politik Elektoral terkait strategi pemilihan umum. 2) Partisipasi Partai terhadap masyarakat terkait strategi komunikasi politik.

Penjabaran melihat bagaimana partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. secara konseptual, partai politik yang bisa mencitrakan dengan baik di mata publik, partai itu akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik. Sebaliknya, jika suatu partai di mata publik memiliki citra yang tidak diinginkan oleh publik, maka kecenderungan untuk diabaikan oleh publik juga akan cukup tinggi. Menurut Lutfi (2009) pada kenyataannya saat ini partai-partai politik berupaya untuk selalu tampil sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Upaya pencitraan partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di masyarakat.

1. Partisipasi Politik DPW PPP Jawa Tengah dalam dinamika Politik Elektoral

Sistem kepartaian yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksud untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi sistem politik dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi partai yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok baru ke dalam sistem politik.

Pelembagaan partai politik juga dilakukan dengan menguatkan daya saing partai yaitu berkaitan dengan kapasitas atau tingkat komoetensi partai untuk berkompetensi dengan partai lain dalam arena pemilu maupun kebijakan public. Daya saing yang tinggi dari partai ditunjukkan dalam kapasitasnya dalam mewarnai kehidupan politik yang didasari pada program dan ideologi partai sebagai arah perjuangan partai. Secara teoritik daya saing partai berarti kapasistansya untuk memperjuangkan program yang telah disusun, partai yang demikian seringkali dianggap memiliki identitas partai yang programatik.

Dengan demikian, secara keseluruhan pelembagaan partai dapat dilihat dari seberapa partai memperkuat dirinya dalam hal pengakaran, legitimasi, pembuatan aturan, dan peningkatan daya saing (Setiadi, 2008).

Perjalanan pelembagaan DPW PPP Jawa Tengah berkonsisten merawat ideologi partai politik berbasis islam yang mampu merebut masa nasionalis. Karena itu islam ideologis yang diusung PPP dalam program pembangunan melalui pintu legislatif dan eksekutif paling ditekankan bukan terkait islam simbol, melainkan islam substantif yang meletakkan nilai-nilai islam dalam sistem dasar karakter pembangunan bangsa. Melalui politik legislasi (perundang-undangan).

Diskursus tentang DPW PPP Jawa Tengah semakin menarik karena banyaknya permasalahan yang melilit dalam dinamika politik partai islam. Pada pemilu tahun 2009 PPP mengalami banyak penurunan suara dengan memperoleh 8 kursi, kemudian pemilu tahun 2014 masih konsisten dengan kursi dan suaranya yaitu 8 kursi di parlemen, kemudian pada pemilu tahun 2019 kembali mengalami penurunan suara akan tetapi dengan pelebaran dapil PPP Jawa Tengah mendapatkan penambahan kursi menjadi 9 anggotanya dengan suara 1,44jt dengan posisi nomor 6 dari total suara sah nasional 27,89jt.

Permasalahan pertama yang dihadapi adalah sulitnya DPW PPP Jawa Tengah dalam membawa dan mengemas isu-isu strategis yang menyentuh basis massanya diantara isu-isu keagamaan yang diusung oleh PPP sudah tidak menjadi monopoli PPP atau partai islam terlebih dalam politik elektoral, karena isu-isu keagamaan tersebut sudah menjadi bagian bersama dengan partai-partai nasionalis. Sehingga para konstituen basis masa menilai bahwa isu yang digelontorkan PPP tidak menjadi perhatian para konstituennya. Dalam kondisi tersebut, maka suara DPW PPP Jawa Tengah tidak lagi bisa dimonopoli sebagai partai yang memperjuangkan umat islam.

“Memang, perlu diakui kalau kita suaranya menurun dalam pemilu terakhir yaitu tahun 2019, walaupun sebelumnya kita sudah mengahntarkan Gus Yasin dalam pilkada 2018, akan tetapi balik lagi semua itu hasil dari segala bentuk usaha dan kiprah kader, pengurus dan seluruhnya yang berada pada kubu kita DPW PPP Jawa Tengah, mau baik maupun hasil buruk. Tahun 2019 memang perlu kita akui bersama kalau kursi meningkat satu lebih banyak ketimbang periode sebelumnya tapi itu karena pemekaran dapil, ya kalau hitung-hitungan secara

suara kita jauh ada seratus ribu lebih suara kita menurun, dan juga suara kita sebetulnya banyak akan tetapi suara itu mencair jadinya kita gak bisa mendapatkan kursi sesuai dengan suara yang dihasilkan.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Melemahnya suara DPW PPP Jawa Tengah dalam Kiprahnya pada politik elektoral adalah persoalan korupsi yang menjerat tokoh kader elit PPP tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, gambaran tersebut menampilkan DPW PPP Jawa Tengah yang selama ini mencitrakan sebagai partai islam membuat konstituen menjadi apatis dan memberikan stigma buruk kepada DPW PPP Jawa Tengah sebagai komitmen keislamannya sendiri. Gambaran semakin turunnya citra dan suara DPW PPP Jawa Tengah yang belum bisa terjelaskan adalah setali tiga uang dengan partai lain, bahwa demokrasi elektoral dengan tingginya biaya politik akan melahirkan politik transaksional akhirnya memaksa tokoh san kader partai mencari pembiayaan sebanyak-banyaknya agar terpilih lagi menjadi anggota legislative, kepala daerah dan atau untuk pembiayaan operasional partainya.

2. Partisipasi Partai terhadap masyarakat terkait strategi komunikasi politik.

Salah satu cara yang paling penting dilakukan oleh partai untuk dapat menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya dengan melalui kiprah partai di masyarakat. Kiprah partai di masyarakat adalah dengan melalui kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal kader partai (Lutfi, 2009). Kegiatan yang dimaksud adalah pengenalan partai seperti dengan symbol-simbol, atau pelatihan yang tujuannya menanamkan ideologi. Sehingga keberadaan partai bisa diketahui oleh publik. Kegiatan-kegiatan DPW PPP Jawa Tengah dalam mengenalkan PPP di masyarakat tentunya harus diiringi dengan komunikasi politik yang baik, bagaimana meyakinkan masyarakat dengan berbagai kegiatan maupun strategi. Sehingga bisa memunculkan citra yang baik untuk masyarakat dalam menilai partai.

Strategi politik yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan perolehan suara, dalam hal ini DPW PPP Jawa Tengah melakukan strategi pengetahuan publik dengan komunikasi politik berdasarkan usia dalam menjalankan strategi politiknya, berikut adalah langkah-langkah

strategi dalam pengetahuan publik oleh DPW PPP Jawa Tengah dalam menarik simpati pemilih dari kalangan pemuda dan orang tua.

a. Usaha Strategi Komunikasi Politik DPW PPP Jawa Tengah Untuk Generasi Baru

Perkembangan politik di Indonesia berjalan cukup cepat, perubahan dan perbaikan banyak terjadi di berbagai sektor. Setiap partai politik berbenah dengan pengalaman dan tantangan masing-masing. DPW PPP Jawa Tengah melakukan perubahan dengan serius dalam melihat problematika dan keterpurukan setelah mengalami penurunan konstituen pemilih dan trend masyarakat yang relatif mengarah pada generasi yang tergolong dalam pemilih pemula dengan cara-cara milenial menjadi focus dan prioritas tersendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPW PPP Jawa Tengah dalam rangka menggaet pemilih dari kalangan pemuda, tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan, karena selama ini PPP identik dengan partainya orang tua. Usaha membangun citra salah satunya DPW PPP Jawa Tengah mengadakan Turnamen futsal atau kampanye terbuka dengan mendatangkan artis atau band. Untuk mengubah mindset masyarakat yang biasanya PPP mengadakan kampanye dengan hal-hal yang bernuansa religi seperti marawis, qosidah atau pengajian yang mengundang sedikit partisipasi masyarakat pemilih untuk datang ke kampanye tersebut.

Gambar 5.1 DPW PPP Jawa Tengah Bersama Generasi Muda



Sumber : Dokumentasi DPW PPP Jawa Tengah

“Sebagai bahan penarik perhatian dan membangun ulang citra publik kami juga turut andil gaol dalam kalangan muda, karena itu jangan melihat dan kami juga tidak ingin lagi dilihat sebagai partai tua tanpa tau hiburan dalam pendekatan yang menarik dengan bungkus yang rapih, kita juga menyesuaikan, dalam akademisi kita melihat potensi-potensi mahasiswa yang pintar maupun aktif dalam organisasi untuk kemudian kita turut serta berdiskusi maupun mengadakan forum atau seminar dan kami juga berusaha mengadakan kegiatan sesuai dengan minat yang bisa menggaet generasi muda, seperti futsal, band , kita adakan turnamen dan konser dan tentu segala aktivitas yang ada tetap bernuansa PPP sesuai dengan landasan partai kita, dan selanjutnya kami memfokuskan untuk digitalisasi, mengembangkan citra PPP melalui media sosial yang memudahkan kita untuk menyebarkan informasi dan saling berkomunikasi” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Konsekuensi masyarakat digital diantaranya, perilaku masyarakat yang terkesan sekuler dan diluar pakem politik. Simbol, warna, atau label politik maupun agama tidak menjadi faktor penentu pilihan mereka, hal itu sudah dibuktikan oleh DPW PPP Jawa Tengah. Profil tokoh agama, kiyai atau figure penting, tertentu tidak menjadi refensi. Masyarakat golongan ini cenderung kritis, rasional, idealis melihat prestasi dan kinerja partai politik. dalam konteks ini, DPW PPP Jawa Tengah, selayaknya telah maksimal memfokuskan diri menyapa komunitas milenial ini dengan program dan argument rasional meyakinkan mereka, terlebih DPW PPP Jawa Tengah dalam mengawal mereka untuk membangun paradigma pengelolaan partai secara digital.

b. Usaha Komunikasi Politik DPW PPP Jawa Tengah Untuk Kalangan Orang tua

Dinamika DPW PPP Jawa Tengah dalam upaya mempertahankan eksistensi menyelamatkan jenjang partai dan perjuangannya dalam fungsinya sebagai partai politik silam adalah merawat konstituen sekaligus perluasan basis dukungan dengan rajin bersilaturahmi pada figure referensi politik masyarakat, seperti tokoh agama local, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, buruh, kalangan petani, dan sering menyambangi Kembali pondok pesantren. Aktivitas tersebut sesungguhnya adalah upaya menyapa, mendekati, peduli dan melayani mereka sesuai kemampuan institusi partai.

Gambar 5.2 DPW PPP Jawa Tengah Bersama Para Ulama



Sumber: Dokumentasi DPW PPP Jawa Tengah

“Untuk target orang tua atau ibu - ibu kita biasanya mengadakan ziarah-ziarah, selain ke walisongo yak e akan kyai-kyai yang ada di Semarang, kemudian ke makam orang-orang PPP terdahulu, kalau gak ya silaturahmi kerumahnya, hal itu juga cukup menarik perhatian masyarakat setidaknya ada gambaran bahwa PPP itu peduli. Kusus ibu ibu ya pelatihan masak atau lomba nyanyi mars PPP. Itu juga merupakan salah satu upaya kami dalam membangun citra public, atau strategi dalam pendulungan suara PPP di Kabupaten Semarang.” (wawancara, Afif 17 April 2023)

Kaderisasi secara massal atau umum untuk kalangan orang tua mengadakan acara bersama seperti Maulid Pengajian dengan para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya dan studi tour wisata bersama dengan di iringi nuansa religius Seperti Ziarah ke Makam Kyai-Kyai besar di Jawa Tengah, ziarah ke makam orang-orang tokoh PPP terdahulu yang ikut berjuang di PPP Jawa Tengah, dan seperti halnya untuk ibu-ibu ada kegiatan bersama antara lain program pemberdayaan dan lainnya seperti jelas penulis diatas.

BAB VI

PENUTUP

Akhir dari penelitian, bab ini merupakan penjelasan kesimpulan kemudian ditutup dengan saran dan rekomendasi dari karya penulisan yang telah tergabung menjadi sebuah penelitian yang disebut skripsi. Hal ini dilakukan sebagai akhir dari hasil kajian penelitian yang membawakan alasan dalam latar belakang sehingga timbul rumusan masalah yang perlu jawaban. Selain akhir dari penelitian, pada bab ini juga disajikan kepada penelitian serupa kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai studi pelebagaan partai politik islam di jawa tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Pertama, Derajat Kesisteman DPW PPP Jawa Tengah berada pada derajat yang rendah. Hal itu dikarenakan belum terlaksananya AD/ART secara konsisten serta tidak adanya rincian yang jelas dan terlaksana tentang demokratisasi internal partai yang menyangkut proses pemilihan dan pencalegan. Dalam menjalankan musyawarah wilayah tahunan pernah melakukan aklamasi yang mengartikan bahwa tidak adanya demokratisasi. Selanjutnya, penentuan kebijakan partai memang ditentukan oleh pengurus DPW PPP Jawa Tengah akan tetapi hal-hal yang krusial selalu dikordinasikan, dan itu mengakar ke segala hal yang akhirnya setiap mengambil keputusan selalu menunggu persetujuan dari DPP PPP.

Kedua, Derajat Identitas Nilai DPW PPP Jawa Tengah berada dalam posisi sedang. Langkah DPW PPP Jawa Tengah dalam melakukan identifikasi terhadap basis masa bertaraf sosial DPW PPP Jawa Tengah melihat celah dengan merangkul dan memasuki organisasi yang sejalan dengan DPW PPP Jawa Tengah. Kemudian, jelas walaupun DPW PPP Jawa Tengah menjalin hubungan tetapi mempunyai syarat harus sejalan, selain itu DPW PPP mempunyai organisasi sayap sejumlah enam badan otonom yang dilihat terlalu banyak dan kurang efektif, kepedulian DPW PPP Jawa Tengah pun masih sangat kurang bahkan tak jarang badan otonom itu yang kemudian tidak aktif, hanya aktif jika ada acara besar dan mendekati pemilu saja. Kemudian, DPW PPP Jawa Tengah masih menunjukkan kelemahan dalam segi pertanggung jawaban kepada masyarakat umum, tidak adanya

pertanggung jawaban kepada masyarakat umum terutama pemilihnya tersebut merupakan kelemahan yang merujuk pada hubungan partai kepada masyarakat.

Ketiga, Derajat Otonomi DPW PPP Jawa Tengah berada pada posisi sedang, penilaian tersebut didasarkan pada hubungan yang dibangun oleh DPW PPP Jawa Tengah dengan actor luar partai berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada DPW PPP Jawa Tengah. Dalam hubungan itu, DPW PPP Jawa Tengah tidak peduli tanpa melihat ataupun konsultasi dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra dan pendukung untuk memutuskan sebuah perkara yang akan dilakukannya. Meskipun tidak melakukan konsultasi dengan mitra yang berjalan bersama akan tetapi DPW PPP Jawa Tengah tetap memenuhi posisi dan ketetapanannya agar selalu mengkoordinasikan dengan pihak DPP PPP.

Keempat, Derajat Pengetahuan Publik berada dalam posisi sedang. Hal tersebut didasarkan pada usaha DPW PPP Jawa Tengah dalam meningkatkan citranya yang terdampak kasus-kasus dan isu-isu agama ditingkat nasional, melihat Provinsi Jawa Tengah bukan lumbung suara PPP. Strategi komunikasi dengan membagi Antara kalangan uda dan kalangan muda cukup efektif. Dimana program dan kegiatan pengenalan partai dapat diterima dengan baik. Selain itu juga membangun citra publik dengan media massa social juga sudah diterapkan, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Tapi hasil pemilu 2019 kemaren menunjukkan bahwa pelembagaan DPW PPP Jawa Tengah dalam derajat pengetahuan publiknya sudah berhasil. Dengan didasarkan hal tersebut DPW PPP Jawa Tengah masih bisa eksis meski suara menurun.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pelembagaan partai politik islam masih belum bisa dikatakan terlembaga sesuai pertimbangan Randall & Svasand dan perlu internalisasi dan evaluasi lebih jauh lagi. Randall & Svasand mengakui rendahnya derajat kesisteman partai yang mengakar dalam masyarakat, struktur organisasi partai yang tidak stabil yang tidak mengacu padada AD/ART, dan citra partai dimata public yang masih relatif buruk. Selain itu, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik kharismatik dan klientelistik ketimbang partai programatik.

Lemahnya pelebagaan partai politik di Indonesia, terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang memiliki ciri-ciri. Meningkatnya aktivitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang sangat amat longgar, belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan yang kuat.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa peneliti sampaikan sebagai dasar pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya PPP konsisten merawat ideologi parpol berbasis massa Islam yang mampu juga merebut massa nasionalis. Karena itu Islam ideologis yang diusung PPP dalam program pembangunan melalui pintu legislatif dan eksekutif tetaplah bukan Islam simbol, melainkan Islam substantif yang meletakkan nilai-nilai Islam dalam sistem karakter pembangunan bangsa. Melalui politik legislasi (perundang-undangan) di legislatif dan pemerintahan yang bernuansa nilai Islam kendati tanpa menonjolkan Islam simbolik. Pilihan strategi ini akan jauh lebih dapat diterima oleh masyarakat Islam politik maupun Islam kultural, bahkan Islam nasionalis karena akan lebih *soft and high politics* dalam membawa *Islam Rahmatan Lil Alamin*.
2. PPP perlu memiliki kader yang kuat agar dapat menjalankan manajemen organisasi Parpol yang rapi, sistematis dan meritokratis. Pilihan ini penting karena ke depan hanya parpol yang memiliki kader organisasi yang solidlah yang akan yang militan dan menguasai masa depan. Di titik ini PPP memerlukan rancang bangun sekolah kader. Di dalamnya perlu dibedakan medan rekrutmen kader parpol untuk dipersiapkan dalam menempati 3 (tiga) posisi penting Parpol, yakni: (1) kader yang disiapkan untuk menjadi pengurus dan manager parpol; (2) kader yang disiapkan untuk mengisi jabatan eksekutif; dan (3) kader yang disiapkan untuk mengisi jabatan legislatif. Masing-masing kader perlu disiapkan dalam penjenjangan meritokratis yang sistematis dengan rancangan sekolah kader yang

terstruktur. Disinilah PPP perlu bergandengan tangan dengan akademisi dan aktifis NGO untuk merancang sekolah kader.

3. PPP perlu segera untuk membidik kader-kader terbaik bangsa yang potensial di segala lini dan profesi untuk terlibat direkrut dalam kaderisasi parpol. Karena harus diakui salah satu kelemahan PPP adalah tak adanya figur yang menonjol dan kuat sehingga mampu membawa visi misi parpol dalam politik dan kebijakan publik. Lebih dari itu, secara umum kelemahan utama parpol Islam adalah tak adanya tokoh yang mampu membawa kepemimpinan yang berkarakter Islami yang diharapkan mampu menyatukan gerak dan pandangan parpol-parpol Islam dalam satu visi. Maka PPP berpeluang untuk itu, karena PPP adalah parpol paling senior diantara parpol Islam lainnya yang lahir lebih dahulu dan memiliki rekam jejak pengalaman yang panjang. Kelebihan ini harus menjadi alat bergaining politic dari parpol Islam lainnya.
4. PPP perlu pendanaan parpol yang memadai. Harus diakui pemilu model langsung adalah pemilu yang lebih membutuhkan pendanaan yang kuat. Tanpa dana yang kuat mustahil parpol mampu bertahan bahkan menjadi pemenang pemilu. Walaupun dalam politik uang bukanlah segala-galanya, namun uang tetaplah penting dalam politik. Salah satu kelemahan PPP adalah tak cukup memiliki dana yang memadai guna pembiayaan organisasi parpol, rekrutmen, pengkaderan dan pembiayaan kegiatan Parpol. Maka PPP perlu merancang sumber pendanaan abadi Parpol, melalui iuran yang kian terorganis dan pegumpulan donasi dana publik yang dikelola dengan manajemen yang akuntabel dan transparan.
5. PPP perlu merancang desain program kerja parpol yang mampu menggaik pemilih milineal yang memiliki karakter perilaku politik yang berbeda dari pemilih lainnya. Antara lain: perlu menyediakan teknologi komunikasi berbasis media konvergensi yang dapat mendekati partai kepada mereka, perlu keterlibatan Parpol pada isu-isu yang digemari dalam genri gaya hidup (life style) milineal, melalui pendekatan budaya pop, mulai dari musik, film, dll. Ke depan pemilih milineal akan menjadi kunci keberhasilan Parpol dalam pemilu, karena itu Parpol mana yang mampu

menguasai bahasa dan gaul dengan pemilih milineal maka Parpol akan bermasa depan cerah.

6. PPP perlu mendorong agar semua kader partai dapat berperilaku yang Islami dan berkarakter kuat sebagai penjelmaan nilai-nilai religiusitas. Ini penting karena berfungsi sebagai pembeda dari partai lainnya. Dititik ini DPW PPP Jawa Tengah perlu memiliki sensitifitas tinggi agar elit politiknya tak korupsu dan berperilaku religius.
7. PPP perlu kemampuan khusus dengan aneka desian program parpol yang kian mampu mnyerap aspirasi publik dan tidak berperilaku pragmatis. Salah satu kelemahan agar PPP dalam model rekrutmen kader di parlemen maupun di Pilkada tak jauh beda dengan parpol lainnya, maka ada warna pembeda maka PPP perlu merubah watak dan mindsetnya ke arah reformatif dan responsif pada keinginan dan kemauan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Advi, Fauzul Fadhil. (2021). Analisis Penurunan Suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019. Padang: Universitas Andalas.
- Agung, Pratama. (2021). Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang, *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 2 No. 1, Januari 2021.
- Ahmad Tanzeh. (2011). Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 11.
- Azizah ,Nurul. (2014). PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM SEBAGAI RUMAH ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus di DPW PPP Jatim) Situbondo: Institut Agama Islam Ibrahimy.
- Charlyna, Purba. (2017). Eksistensi Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014) Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 27-33.
- Dinda, Aprilliasti. (2015). MASA DEPAN PARTAI POLITIK ISLAM (Studi tentang Konflik Elit PPP dalam Perspektif Pengurus DPW PPP Jawa Timur) Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Efriza (2012). Political Explore. Bandung: CV. Alfabeta. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (2013). Sumedang Memilih. Sumedang: KPU Kabupaten Sumedang, 256-270.
- Fransiska ,Maria Ignasia. (2022). Eksistensi Partai Islam di Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Masruhan, Samsurie. 2021. *Menunggu Singa-singa PPP “Bangun Tidur”*. Semarang: Mata Hati, Vol 1-5.
- Khikmawanto. (2021)PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (Assesment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang) Tangerang: STISIP Yuppentek.
- Labolo, Muhammad. Teguh, Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta,79.
- Lutfi, Muhammad, 2009. Tesis Pelembagaan Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu)
- Maulana, Alfian. (2012). Strategi Pengelolaan Konflik Internal Partai Politik (Studi Terhadap Pembekuan Dewan Cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- MD, Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty. 1993, 10-12.
- Nawawi, Hadari. (1987). Metode Penelitian Social. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 77.
- Pamungkas, Sigit, 2011, Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Randall, Vicky dan Lars Svasand. 2002. *“Party Institutionalzation in New Democracies”* Dalam Jurnal Party Politics, Vol.8 No. 1. London: Sage Publication.
- Richard, S. William Cross. 1960. The personalitazion of Democratic Politic and the Chalenge for Political Parties, Padang: Universitas Andalas, 15-17
- Ridho, Alhamidi. 2023. Partai Politik Masyarakat dan Tata Kelola Kebijakan Publik di Kota Yogyakarta, Yogyakarta: FISIP UMY

- Romli, Lili. 2021. Pelembagaan Partai Politik Era Reformasi. Makalah dalam seminar “Pelembagaan Partai Politik”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta
- Salmi. (2022). “Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020” (Studi Tentang Penguatan Kelembagaan KPU Dalam Mengatasi Partisipasi Pemilih Yang Fluktuatif). Makassar: Universitas Hasanudin.
- Samuel Huntington. Tertib Politik Didalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jakarta : CV. Rajawali, 1983, 65-77.
- Santo, Arden Gunawan. (2021). Komunitas Masyarakat Dan Politik : Peran Dan Pengaruh Komunitas Masyarakat Dalam Pilkada Di Kota Makassar Tahun 2020. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Setiadi, Wicipto. 2008. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 1: Jakarta
- Sugiyono. 2010 “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ” Bandung : Alfabeta, 61.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet Anugerah Abadi, 77-79.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo: Jakarta, 170-175.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik No. 2 Tahun 2011, LN No. 8 TLN No. 5189.
- Wawan Kuswandro, 2015. Teori Pelembagaan Partai Politik Randall Dan Svansand. Vol.1.
- Zuly, Qodir. 2012. Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik Dan Demokrasi Di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 14.

Daftar wawancara,

Wawancara, Ngainirrichard 1 April 2023

Wawancara, Masruhan, 5 April 2023

Wawancara, Farid 7 April 2023

Wawancara, Afif 17 April 2023

Wawancara, Arwani 27 April 2023

LAMPIRAN

FOTO – FOTO PENELITIAN



Foto bersama setelah wawancara di sela-sela kegiatan dengan Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Syamsurie



Foto bersama setelah wawancara bersama Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi (Gus Aang)



Foto bersama setelah wawancara dengan Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah M.
Ngainirrichadl



Foto setelah wawancara bersama Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah Farid Masduqi



Foto bersama setelah wawancara bersama Afif sebagai Kader PPP

CURICULUM VITAE



Nama : Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi
TTL : Batang, 14 September 2001
Alamat : Jl. Raya Lama Gringsing Gg.II No. 8 RT1/3
Desa : Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kab. Batang
NIM : 1906016124
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.64
Agama : Islam
Email : alayyubygringsing@gmail.com
HP : 08883623600

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA NAWA KARTIKA GRINGSING
2. MI SALAFIYYAH GRINGSING
3. MTS NUR ANOM GRINGSING
4. SMAN 1 GRINGSING
5. S1 ILMU POLITIK UIN WALISONGO SEMARANG

RIWAYAT ORGANISASI

1. Departemen Sosial Agama KMBS 2020
2. Ketua Bidang Olahraga dan Seni Racana Walisongo 2021
3. Ketua UKM QAI FISIP 2021
4. Bidang Sosial Masyarakat HMJ Ilmu Politik 2020
5. Departemen Keagamaan DEMA FISIP 2021